

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan data-data yang berhasil dikumpulkan, hasil pengolahan data dan pembahasan dari hasil pengolahan data. Sistematika pembahasan bab ini terdiri dari sampel penelitian, analisis data yang meliputi analisis statistik deskriptif, pengujian normalitas, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskriptif Sampel

Sampel penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah termasuk kabupaten dan kota yang ada di provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 1995-2012. Pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan *purposive sampling* dengan kriteria sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Adapun secara rinci pemilihan sampel berdasarkan kriteria tersebut disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Sampel Penelitian

No	Kriteria Penetapan Sampel	Jumlah (kota/kab)	Persentase
1	Seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu	10	100
2	Pemerintah daerah kabupaten/kota yang merupakan daerah pemekaran selama tahun pengamatan dari 1995-2012	6	60
Sampel penelitian yang digunakan		4	40

Sumber: Data Sekunder diolah (2014)

Terdapat 10 pemerintah daerah Kota/Kabupaten yang ada di provinsi Bengkulu, dari 10 Kota/Kabupaten yang ada di provinsi Bengkulu terdapat 6 daerah yang merupakan daerah pemekaran selama tahun pengamatan dari 1995-2012, sehingga diperoleh 4 pemerintah daerah kabupaten dan kota yang tidak merupakan daerah pemekaran selama periode penelitian dan yang telah menyajikan laporan realisasi anggaran yang terdaftar di dirjen perimbangan keuangan pemerintah, dengan alasan kelengkapan data dan diasumsikan bahwa ke empat daerah kabupaten dan kota tersebut memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang sama serta memiliki permasalahan yang sama. Dengan tahun pengamatan dari 1995-2012 yang dijadikan sebagai sampel, sehingga observasi yang diperoleh sebanyak 72 observasi (Lampiran 1).

4.1.2 Statistik Deskriptif

Analisis *statistik deskriptif* memperlihatkan gambaran awal mengenai karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian, yaitu meliputi jumlah sampel (n), nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi untuk masing-masing variabel penelitian. Berdasarkan data dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama periode tahun 1995-2012 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Keuangan dan Perimbangan, maka dapat dihitung rasio-rasio yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio share (kontribusi) PAD terhadap total belanja daerah, dan rasio growth (pertumbuhan) PAD dari tahun penelitian dengan tahun sebelumnya.

Tabel 4.2

Tabel pengkodean atas variabel atau rasio yang akan diuji

Kode	Rasio	Periode penelitian
RDF1	Rasio Desentralisasi Fiskal	2007-2012
RDF2	Rasio Desentralisasi Fiskal	2001-2006
RDF3	Rasio Desentralisasi Fiskal	1995-2000
RkKD1	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	2007-2012
RkKD2	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	2001-2006
RkKD3	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	1995-2000
RKD1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	2007-2012
RKD2	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	2001-2006
RKD3	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	1995-2000
REKD1	Rasio Efektivitas PAD	2007-2012
REKD2	Rasio Efektivitas PAD	2001-2006
REKD3	Rasio Efektivitas PAD	1995-2000
RS1	Rasio <i>Share</i> (Kontribusi) PAD	2007-2012
RS2	Rasio <i>Share</i> (Kontribusi) PAD	2001-2006
RS3	Rasio <i>Share</i> (Kontribusi) PAD	1995-2000
RG1	Rasio <i>Growht</i> (Pertumbuhan) PAD	2007-2012
RG2	Rasio <i>Growht</i> (Pertumbuhan) PAD	2001-2006
RG3	Rasio <i>Growht</i> (Pertumbuhan) PAD	1995-2000

Statistik deskriptif setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3
Statistik Deskriptif Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RDF1	24	0,03	0,35	0,0739	0,07501
RDF2	24	0,00	0,9	0,0378	0,01839
RDF3	24	0,02	0,14	0,0536	0,04219
RkKD1	24	0,39	9,10	1,4503	1,85594
RkKD2	24	0,76	2,95	1,0941	0,58699
RkKD3	24	0,68	0,97	0,8840	0,08905
RKD1	24	0,03	0,16	0,0606	0,03163
RKD2	24	0,00	0,10	0,0401	0,02298
RKD3	24	0,02	0,20	0,0670	0,05984
REKD1	24	0,02	1,56	0,9364	0,46138
REKD2	24	0,18	1,68	0,9401	0,29539
REKD3	24	0,62	1,38	0,9279	0,13493

RS1	24	0,03	1,91	0,2284	0,44101
RS2	24	0,00	64,73	2,7405	13,20410
RS3	24	0,02	0,28	0,0964	0,08197
RG1	24	-0,16	0,73	0,1709	0,23367
RG2	24	-0,91	6,34	0,6914	1,46512
RG3	24	-0,42	1,07	0,1913	0,38195
Valid N (listwise)	24				

Sumber: Data Sekunder diolah 2014 (Lampiran 2)

Dari tabel 4.3 dapat dijelaskan beberapa informasi yang menggambarkan data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa secara rata-rata (*mean*) rasio derajat desentralisasi fiskal pada perbandingan pertama (2007-2012) 0,0739 lebih besar dibandingkan rata-rata (*mean*) pada periode penelitian (2001-2006) 0,0378 dan periode penelitian (1995-2000) 0,0536. Nilai maksimum rasio derajat desentralisasi fiskal pada perbandingan pertama (2007-2012) 0,35 juga lebih besar dibandingkan Nilai maksimum pada periode penelitian (2001-2006) dan (1995-2000) yaitu sebesar 0,9 dan 0,14. Nilai minimum rasio derajat desentralisasi fiskal pada perbandingan pertama (2007-2012) 0,03 tetap lebih besar dibandingkan Nilai minimum pada periode penelitian (2001-2006) dan (1995-2000) yaitu sebesar 0,00 dan 0,02. Nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan nilai *mean* menunjukkan bahwa data rasio derajat desentralisasi fiskal tersebut bervariasi untuk periode penelitian (2007-2012) namun tidak sama dengan periode penelitian (2001-2006) dan (1995-2000) bahwa standar deviasi nya lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* yang menunjukkan bahwa data rasio derajat desentralisasi fiskal tersebut tidak bervariasi.

Variabel yang kedua menunjukkan secara rata-rata (*mean*) rasio ketergantungan keuangan daerah pada perbandingan pertama (2007-2012) 1,4503 lebih besar dibandingkan rata-rata (*mean*) pada periode penelitian (2001-2006) 1,0941 dan periode penelitian (1995-2000) 0,8840. Nilai maksimum rasio ketergantungan keuangan daerah pada perbandingan pertama (2007-2012) 9,10 lebih besar dibandingkan rasio ketergantungan keuangan daerah pada periode penelitian (2001-2006) dan (1995-2000) yaitu sebesar 2,95 dan 0,97. Sedangkan pada nilai minimum rasio ketergantungan keuangan daerah periode penelitian (2007-2012) 0,39 lebih kecil jika dibandingkan nilai minimum pada periode penelitian (2001-2006) dan (1995-2000) yaitu sebesar 0,76 dan 0,68. Standar deviasi rasio ketergantungan keuangan daerah periode penelitian (2007-2012) 1,85594, pada periode penelitian (2001-2006) dan (1995-2000) yaitu sebesar 0,58699 dan 0,08905.

Variabel yang ketiga menunjukkan secara rata-rata (*mean*) rasio kemandirian keuangan daerah pada perbandingan pertama (2007-2012) 0,0606 lebih besar dibandingkan periode penelitian (2001-2006) 0,0401, namun pada periode penelitian (1995-2000) 0,0670 juga lebih besar dibandingkan periode penelitian (2001-2006) tapi lebih kecil dibandingkan periode penelitian (2007-2012). Nilai maksimum rasio kemampuan keuangan daerah (1995-2000) 0,20 lebih besar dibandingkan periode penelitian (2007-2012) dan (2001-2006) yaitu sebesar 0,16 dan 0,10. Nilai minimum rasio kemampuan keuangan daerah (2007-2012) 0,03 lebih besar dibandingkan periode penelitian (2001-2006) dan (1995-2000) yaitu sebesar 0,00 dan 0,02. Nilai standar deviasi yang lebih kecil

dibandingkan dengan nilai *mean* menunjukkan bahwa data rasio kemampuan keuangan daerah pada periode penelitian (2007-2012), (2001-2006), dan (1995-2000) tidak bervariasi.

Variabel yang keempat menunjukkan secara rata-rata (*mean*) rasio efektivitas keuangan daerah periode penelitian (2007-2012) 0,9364 lebih kecil dibandingkan periode penelitian (2001-2006) 0,9401 tetapi lebih besar dibandingkan periode penelitian (1995-2000) 0,9279. Nilai maksimum rasio efektivitas keuangan daerah periode penelitian (2007-2012) 1,56 lebih kecil dibandingkan periode penelitian (2001-2006) 1,68 tetapi lebih besar dibandingkan periode penelitian (1995-2000) 1,38. Nilai minimum rasio efektivitas keuangan daerah periode penelitian (2007-2012) 0,02 lebih kecil dibandingkan periode penelitian (2001-2006) 0,18 dan periode penelitian (1995-2000) 0,62. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* menunjukkan bahwa data rasio efektivitas keuangan daerah pada periode penelitian (2007-2012), (2001-2006), dan (1995-2000) tidak bervariasi yaitu 0,46138, 0,29539, dan 0,13493.

Variabel yang kelima menunjukkan secara rata-rata (*mean*) rasio *share* (kontribusi) periode penelitian (2001-2006) 2,7405 lebih besar dibandingkan dengan periode penelitian (2007-2012) dan (1995-2000) yaitu sebesar 0,2284 dan 0,0964. Nilai maksimum rasio *share* (kontribusi) periode penelitian (2001-2006) 64,73 lebih besar dibandingkan dengan periode penelitian (2007-2012) dan (2001-2006) yaitu sebesar 1,91 dan 0,28. Sedangkan nilai minimum rasio *share* (kontribusi) periode penelitian (2007-2012) 0,03 lebih besar dibandingkan dengan

periode penelitian (2001-2006) 0,00 dan periode penelitian (1995-2000) 0,02. Nilai standar deviasi rasio *share* (kontribusi) bervariasi karena nilai nya mendekati nilai rata-rata (*mean*).

Variabel keenam menunjukkan secara rata-rata (*mean*) rasio *growht* (pertumbuhan) periode penelitian (2001-2006) 0,6914 lebih besar dibandingkan dengan periode penelitian (2007-2012) dan (1995-2000) yaitu sebesar 0,1709 dan 0,1913. Nilai maksimum rasio *growht* (pertumbuhan) periode penelitian (2001-2006) 6,34 lebih besar dibandingkan dengan periode penelitian (2007-2012) dan (1995-2000) yaitu sebesar 0,73 dan 1,07. Sedangkan nilai minimum rasio *growht* (pertumbuhan) periode penelitian (2007-2012) -0,16 lebih besar dibandingkan dengan periode penelitian (2001-2006) -0,91 dan periode penelitian (1995-2000) -0,42. Nilai standar deviasi rasio *growht* (pertumbuhan) bervariasi karena nilai nya mendekati nilai rata-rata (*mean*).

4.1.3 Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 4.4 (lampiran 3).

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas Periode Penelitian 2001-2006 dengan 2007-2012

	N	Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)	Kesimpulan
RDF1	24	1,541	0,017	Tidak normal
RDF2	24	0,828	0,499	Normal
RkKD1	24	2,275	0,000	Tidak normal
RkKD2	24	1,940	0,001	Tidak normal
RKD1	24	1,128	0,157	Normal

RKD2	24	0,757	0,615	Normal
REKD1	24	1,019	0,250	Normal
REKD2	24	0,744	0,637	Normal
RS1	24	2,082	0,000	Tidak normal
RS2	24	2,630	0,000	Tidak normal
RG1	24	0,812	0,525	Normal
RG2	24	1,702	0,006	Tidak normal

Sumber: data sekunder diolah, 2014 (Lampiran 3)

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal pada tahun penelitian **2007-2012** dan rasio derajat desentralisasi fiskal pada tahun penelitian **2001-2006**, rasio ketergantungan keuangan daerah pada tahun penelitian **2007-2012** dan rasio ketergantungan keuangan daerah pada tahun penelitian **2001-2006** tidak memenuhi kriteria normalitas dengan signifikansi lebih kecil daripada 5%, itu artinya antar data tersebut rentangnya terlalu jauh. Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan pengujian *Wilcoxon Signed Ranks Test* untuk pengujian hipotesis pertama dan kedua.

Rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun penelitian **2007-2012** dan rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun penelitian **2001-2006**, rasio efektivitas keuangan daerah pada tahun penelitian **2007-2012** dan rasio efektivitas keuangan daerah pada tahun penelitian **2001-2006** memenuhi kriteria normalitas dengan signifikansi lebih besar daripada 5% itu artinya antar data tersebut rentangnya tidak terlalu jauh. Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan pengujian parametrik uji beda dua variabel sampel berpasangan (*paired sample t-test*) untuk hipotesis ketiga dan keempat.

Rasio *share* (kontribusi) pada tahun penelitian **2007-2012** dan Rasio *share* (kontribusi) pada tahun penelitian **2001-2006** dan rasio *growht* (pertumbuhan)

pada tahun penelitian **2007-2012** dan rasio *growht* (pertumbuhan) pada tahun penelitian **2001-2006** tidak memenuhi asumsi normalitas dengan signifikansi diatas 5% karena hasil pengujian normalitas menunjukkan tingkat signifikansinya diatas 0,05 yang artinya bahwa data tersebut rentangnya terlalu jauh. Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan pengujian *Wilcoxon Signed Ranks Test* untuk pengujian hipotesis kelima dan keenam.

Pengujian normalitas data kedua dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan tingkat signifikansi 5%, pengujian ini membandingkan data pada tahun penelitian **2007-2012** dan pada tahun penelitian **1995-2000** Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 4.5 (lampiran 4).

Tabel 4.5
Hasi Uji Normalitas Periode Penelitian 1995-2000 dengan 2007-2012

	N	Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)	Kesimpulan
RDF1	24	1,541	0,017	Tidak normal
RDF3	24	1,212	0,106	Normal
RkKD1	24	2,275	0,000	Tidak normal
RkKD3	24	1,365	0,048	Tidak normal
RKD1	24	1,128	0,157	Normal
RKD3	24	1,161	0,135	Normal
REKD1	24	1,019	0,250	Normal
REKD3	24	1,288	0,073	Normal
RS1	24	2,082	0,000	Tidak normal
RS3	24	1,295	0,070	Normal
RG1	24	0,812	0,525	Normal
RG3	24	0,694	0,722	Normal

Sumber: data sekunder diolah, 2014 (Lampiran 4)

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal pada tahun penelitian **2007-2012** dan rasio derajat desentralisasi fiskal pada tahun penelitian **1995-2000**, rasio

ketergantungan keuangan daerah pada tahun penelitian **2007-2012** dan rasio ketergantungan keuangan daerah pada tahun penelitian **1995-2000** tidak memenuhi kriteria normalitas dengan signifikansi lebih kecil daripada 5%, itu artinya antar data tersebut rentangnya terlalu jauh. Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan pengujian *Wilcoxon Signed Ranks Test* untuk pengujian hipotesis pertama dan kedua.

Rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun penelitian **2007-2012** dan rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun penelitian **1995-2000**, rasio efektivitas keuangan daerah pada tahun penelitian **2007-2012** dan rasio efektivitas keuangan daerah pada tahun penelitian **1995-2000** memenuhi kriteria normalitas dengan signifikansi lebih besar daripada 5% itu artinya antar data tersebut rentangnya tidak terlalu jauh. Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan pengujian parametrik uji beda dua variabel sampel berpasangan (*paired sample t-test*) untuk hipotesis ketiga dan keempat.

Rasio *share* (kontribusi) pada tahun penelitian **2007-2012** dan Rasio *share* (kontribusi) pada tahun penelitian **1995-2000** tidak memenuhi asumsi normalitas dengan signifikansi dibawah 5% karena hasil pengujian normalitas menunjukkan tingkat signifikansinya dibawah 0,05 yang artinya bahwa data tersebut rentangnya terlalu jauh. Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan pengujian *Wilcoxon Signed Ranks Test* untuk pengujian hipotesis kelima. rasio *growht* (pertumbuhan) pada tahun penelitian **2007-2012**.

Rasio *growht* (pertumbuhan) pada tahun penelitian **1995-2000** memenuhi kriteria normalitas dengan signifikansi lebih besar daripada 5% itu artinya antar

data tersebut rentangnya tidak terlalu jauh. Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan pengujian parametrik uji beda dua variabel sampel berpasangan (*paired sample t-test*) untuk hipotesis keenam.

4.1.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian ini bertujuan untuk menguji secara signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Apabila tingkat signifikan yang diperoleh (p-value) lebih kecil dari 0,025 maka hipotesis tersebut ditolak atau dengan $\alpha = 5\%$ variabel *independent* tersebut berhubungan secara *statistic* terhadap variabel dependen.

Uji t ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (*independent*) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini adalah jika probabilitas $< 0,025$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah, rasio efektivitas pengelolaan dan pelayanan keuangan daerah, rasio pertumbuhan (*growth*) dan rasio kontribusi (*share*) PAD selama sepuluh tahun terakhir jika dibuat perbandingan antara tahun 2001-2006 dengan 2007-2012.

Sebaliknya jika probabilitas $> 0,025$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio

ketergantungan keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah, rasio efektivitas pengelolaan dan pelayanan keuangan daerah, rasio pertumbuhan (*growth*) dan rasio kontribusi (*share*) PAD selama sepuluh tahun terakhir jika dibuat perbandingan antara tahun 2001-2006 dengan 2007-2012. Lalu akan dibandingkan menggunakan cek balance rasio dengan penelitian sebelum tahun 2000 yaitu 1995-2000 dibandingkan dengan 2007-2012 menggunakan rasio-rasio yang sama. Hasil Pengujian hipotesis dengan menggunakan paired sample t-test, dan *Wilcoxon Signed Ranks Test* untuk seluruh hipotesis disajikan pada Tabel 4.6.

a. Pengujian hipotesis 2001-2006 dengan 2007-2012

Tabel 4.6
Hasil pengujian hipotesis Periode penelitian 2001-2006 dan 2007-2012

	t/Z	Sig (2-tailed)	Kesimpulan
Hipotesis 1	-3,343 ^b	0,001	Diterima
Hipotesis 2	-0,543 ^b	0,578	Ditolak
Hipotesis 3	3,010	0,006	Diterima
Hipotesis 4	-0,032	0,974	Ditolak
Hipotesis 5	-1,714 ^b	0,086	Ditolak
Hipotesis 6	-1,943 ^c	0,052	Ditolak

Sumber: data sekunder diolah, 2014 (Lampiran 5, 6)

- 1) Pengujian hipotesis terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah sepuluh tahun terakhir dengan dibuat perbandingan antara tahun 2001-2006 dengan 2007-2012.**

Pengujian hipotesis pertama menggunakan *Wilcoxon Signed Ranks Test*.

Hasil Pengujian hipotesis pertama menghasilkan nilai t statistik sebesar -3,343^b

dengan signifikansi 0,001 (lebih kecil daripada ρ -value = 0,025). Dengan demikian **Ha₁ diterima**, yang artinya bahwa **terdapat perbedaan** yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah sepuluh tahun terakhir dengan dibuat perbandingan antara tahun 2001-2006 dengan 2007-2012. Dengan demikian rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah tahun anggaran 2007-2012 dalam APBD Kabupaten/Kota pada pemerintah daerah di provinsi Bengkulu mengalami peningkatan dibandingkan tahun anggaran 2001-2006.

2) **Pengujian hipotesis terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio rasio ketergantungan keuangan daerah sepuluh tahun terakhir dengan dibuat perbandingan antara tahun 2001-2006 dengan 2007-2012.**

Pengujian hipotesis kedua menggunakan *Wilcoxon Signed Ranks Test*. Hasil Pengujian hipotesis pertama menghasilkan nilai t statistik sebesar -0,543^b dengan signifikansi 0,578 (lebih besar daripada ρ -value = 0,025). Dengan demikian **Ha₂ ditolak**, yang artinya bahwa **tidak terdapat** perbedaan yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio ketergantungan keuangan daerah sepuluh tahun terakhir dengan dibuat perbandingan antara tahun 2001-2006 dengan 2007-2012. Dengan demikian rasio ketergantungan keuangan daerah tahun anggaran 2007-2012 dalam APBD Kabupaten/Kota pada pemerintah daerah di provinsi Bengkulu mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 2001-2006.

- 3) **Pengujian hipotesis terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah sepuluh tahun terakhir dengan dibuat perbandingan antara tahun 2001-2006 dengan 2007-2012.**

Pengujian hipotesis ketiga menggunakan *paired sample t-test*. Hasil Pengujian hipotesis ketiga menghasilkan nilai t statistik sebesar 3,010 dengan signifikansi 0,006 (lebih kecil daripada ρ -value = 0,025). Dengan demikian **H_{a3} diterima**, yang artinya bahwa **terdapat perbedaan** yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah sepuluh tahun terakhir dengan dibuat perbandingan antara tahun 2001-2006 dengan 2007-2012. Dengan demikian rasio kemandirian keuangan daerah tahun anggaran 2007-2012 dalam APBD Kabupaten/Kota pada pemerintah daerah di provinsi Bengkulu mengalami peningkatan dibandingkan tahun anggaran 2001-2006.

- 4) **Pengujian hipotesis terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio efektivitas keuangan daerah sepuluh tahun terakhir dengan dibuat perbandingan antara tahun 2001-2006 dengan 2007-2012.**

Pengujian hipotesis keempat menggunakan *Wilcoxon Signed Ranks Test*. Hasil Pengujian hipotesis keempat menghasilkan nilai t statistik sebesar -0,032 dengan signifikansi 0,974 (lebih besar daripada ρ -value = 0,025). Dengan demikian **H_{a4} ditolak**, yang artinya bahwa **tidak terdapat perbedaan** yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio efektivitas keuangan daerah sepuluh tahun terakhir dengan dibuat perbandingan antara tahun 2001-2006 dengan 2007-2012. Dengan demikian rasio efektivitas keuangan daerah tahun anggaran 2007-2012 dalam APBD Kabupaten/Kota pada

pemerintah daerah di provinsi Bengkulu mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 2001-2006.

5) Pengujian hipotesis terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari kontribusi (*share*) PAD sepuluh tahun terakhir dengan dibuat perbandingan antara tahun 2001-2006 dengan 2007-2012.

Pengujian hipotesis kelima menggunakan *Wilcoxon Signed Ranks Test*. Hasil Pengujian hipotesis kelima menghasilkan nilai t statistik sebesar -1,714^b dengan signifikansi 0,086 (lebih besar daripada ρ -value = 0,025). Dengan demikian **H_{a5} ditolak**, yang artinya bahwa **tidak terdapat perbedaan** yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari kontribusi (*share*) PAD sepuluh tahun terakhir dengan dibuat perbandingan antara tahun 2001-2006 dengan 2007-2012. Dengan demikian kontribusi (*share*) PAD tahun anggaran 2007-2012 dalam APBD Kabupaten/Kota pada pemerintah daerah di provinsi Bengkulu mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 2001-2006.

6) Pengujian hipotesis terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari pertumbuhan (*growth*) PAD sepuluh tahun terakhir dengan dibuat perbandingan antara tahun 2001-2006 dengan 2007-2012.

Pengujian hipotesis keenam menggunakan *Wilcoxon Signed Ranks Test*. Hasil Pengujian hipotesis keenam menghasilkan nilai t statistik sebesar -1,943^c dengan signifikansi 0,052 (lebih besar daripada ρ -value = 0,025). Dengan demikian **H_{a6} ditolak**, yang artinya bahwa **tidak terdapat perbedaan** yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari pertumbuhan (*growth*) PAD sepuluh tahun terakhir dengan dibuat perbandingan antara tahun 2001-2006 dengan 2007-2012. Dengan demikian pertumbuhan (*growth*) PAD tahun anggaran

2007-2012 dalam APBD Kabupaten/Kota pada pemerintah daerah di provinsi Bengkulu mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 2001-2006.

b. Pengujian hipotesis 1995-2000 dengan 2007-2012

Selanjutnya akan dijelaskan pengujian hipotesis periode penelitian 1995-2000 dan 2007-2012, yang dimulai dari penjelasan tabel dibawah ini.

Tabel 4.7
Hasil pengujian hipotesis periode penelitian 1995-2000 dan 2007-2012

	t/Z	Sig (2-tailed)	Kesimpulan
Hipotesis 1	-1,086 ^b	0,278	Ditolak
Hipotesis 2	-1,714 ^b	0,086	Ditolak
Hipotesis 3	-0,525	0,604	Ditolak
Hipotesis 4	0,087	0,932	Ditolak
Hipotesis 5	-0,086 ^c	0,932	Ditolak
Hipotesis 6	-0,210	0,836	Ditolak

Sumber: data sekunder diolah, 2014 (Lampiran 7, 8)

1) Pengujian hipotesis terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah sepuluh tahun terakhir dengan dibuat perbandingan antara tahun 1995-2000 dengan 2007-2012.

Pengujian hipotesis pertama menggunakan *Wilcoxon Signed Ranks Test*. Hasil Pengujian hipotesis pertama menghasilkan nilai t statistik sebesar -1,086^b dengan signifikansi 0,086 (lebih besar daripada ρ -value = 0,025). Dengan demikian **H_{a1} ditolak**, yang artinya bahwa **tidak terdapat perbedaan** yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio desentralisasi fiskal

keuangan daerah sepuluh tahun terakhir dengan dibuat perbandingan antara tahun 1995-2000 dengan 2007-2012. Dengan demikian rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah tahun anggaran 2007-2012 dalam APBD Kabupaten/Kota pada pemerintah daerah di provinsi Bengkulu mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 1995-2000.

2) Pengujian hipotesis terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio ketergantungan keuangan daerah sepuluh tahun terakhir dengan dibuat perbandingan antara tahun 1995-2000 dengan 2007-2012.

Pengujian hipotesis kedua menggunakan *Wilcoxon Signed Ranks Test*. Hasil Pengujian hipotesis pertama menghasilkan nilai t statistik sebesar $-1,714^b$ dengan signifikansi 0,086 (lebih besar daripada $\rho\text{-value} = 0,025$). Dengan demikian **H_{a2} ditolak**, yang artinya bahwa **tidak terdapat perbedaan** yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio ketergantungan keuangan daerah sepuluh tahun terakhir dengan dibuat perbandingan antara tahun 1995-2000 dengan 2007-2012. Dengan demikian rasio ketergantungan keuangan daerah tahun anggaran 2007-2012 dalam APBD Kabupaten/Kota pada pemerintah daerah di provinsi Bengkulu mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 1995-2000.

3) Pengujian hipotesis terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah sepuluh tahun terakhir dengan dibuat perbandingan antara tahun 1995-2000 dengan 2007-2012.

Pengujian hipotesis ketiga menggunakan *paired sample t-test*. Hasil Pengujian hipotesis ketiga menghasilkan nilai t statistik sebesar $-0,525$ dengan signifikansi 0,604 (lebih besar daripada $\rho\text{-value} = 0,025$). Dengan demikian **H_{a3} diterima**,

yang artinya bahwa **terdapat perbedaan** yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah sepuluh tahun terakhir dengan dibuat perbandingan antara tahun 1995-2000 dengan 2007-2012. Dengan demikian rasio kemandirian keuangan daerah tahun anggaran 2007-2012 dalam APBD Kabupaten/Kota pada pemerintah daerah di provinsi Bengkulu mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 1995-2000.

4) Pengujian hipotesis terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio efektivitas keuangan daerah sepuluh tahun terakhir dengan dibuat perbandingan antara tahun 1995-2000 dengan 2007-2012.

Pengujian hipotesis keempat menggunakan *paired sample t-test*. Hasil Pengujian hipotesis keempat menghasilkan nilai t statistik sebesar 0,087 dengan signifikansi 0,932 (lebih besar daripada ρ -value = 0,025). Dengan demikian **H_{a4} ditolak**, yang artinya bahwa **tidak terdapat perbedaan** yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio efektivitas keuangan daerah sepuluh tahun terakhir dengan dibuat perbandingan antara tahun 1995-2000 dengan 2007-2012. Dengan demikian rasio efektivitas keuangan daerah tahun anggaran 2007-2012 dalam APBD Kabupaten/Kota pada pemerintah daerah di provinsi Bengkulu mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 1995-2000.

5) Pengujian hipotesis terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari kontribusi (*share*) PAD sepuluh tahun terakhir dengan dibuat perbandingan antara tahun 1995-2000 dengan 2007-2012.

Pengujian hipotesis kelima menggunakan *Wilcoxon Signed Ranks Test*. Hasil Pengujian hipotesis kelima menghasilkan nilai t statistik sebesar -0,086^c dengan

signifikansi 0,932 (lebih besar daripada ρ -value = 0,025). Dengan demikian **H_{a5} ditolak**, yang artinya bahwa **tidak terdapat perbedaan** yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari kontribusi (*share*) PAD sepuluh tahun terakhir dengan dibuat perbandingan antara tahun 1995-2000 dengan 2007-2012. Dengan demikian kontribusi (*share*) PAD tahun anggaran 2007-2012 dalam APBD Kabupaten/Kota pada pemerintah daerah di provinsi Bengkulu mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 1995-2000.

6) Pengujian hipotesis terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari pertumbuhan (*growth*) PAD sepuluh tahun terakhir dengan dibuat perbandingan antara tahun 1995-2000 dengan 2007-2012.

Pengujian hipotesis keenam menggunakan *paired sample t-test*. Hasil Pengujian hipotesis keenam menghasilkan nilai t statistik sebesar -0,210 dengan signifikansi 0,836 (lebih besar daripada ρ -value = 0,025). Dengan demikian **H_{a6} ditolak**, yang artinya bahwa **tidak terdapat perbedaan** yang signifikan kinerja keuangan daerah Se-Provinsi Bengkulu dilihat dari pertumbuhan (*growth*) PAD sepuluh tahun terakhir dengan dibuat perbandingan antara tahun 1995-2000 dengan 2007-2012. Dengan demikian pertumbuhan (*growth*) PAD tahun anggaran 2007-2012 dalam APBD Kabupaten/Kota pada pemerintah daerah di provinsi Bengkulu mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 1995-2000.

Selain pengujian secara hipotesis peneliti juga menambahkan perhitungan secara statistik untuk melihat bagaimana kategori kinerja keuangan dari setiap periode penelitian yang digunakan untuk memperjelas bahwa pengujian hipotesis itu benar dan sesuai dengan penghitungan secara penilaian kategori-kategori di

setiap rasio yang digunakan. Dibawah ini adalah tabel kategori dari 6 macam rasio sesuai dengan dijelaskan di bab 3.

Tabel 4.8
Kategori Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Bengkulu

Rasio Keuangan	Sebelum Otoda (1995-2000) %	Keterangan	Krisis Ekonomi (2001-2006) %	Keterangan	Setelah Otoda & Setelah Krisis Ekonomi (2007-2012) %	Keterangan
Desentralisasi Fiskal	5,36	Sangat Rendah	3,78	Sangat Rendah	7,39	Sangat Rendah
Ketergantungan	88,40	Tinggi	109,41	Tinggi	120,03	Tinggi
Kemandirian	6,70	Rendah Sekali	4,01	Rendah Sekali	6,06	Rendah Sekali
Efektivitas	92,79	Efektif	94,01	Efektif	93,64	Efektif
Share	9,64	Sangat Kurang	14,05	Sangat Kurang	22,84	Sangat Kurang
Growht	19,13	Sangat Kurang	69,14	Sedang	17,09	Sangat Kurang

Sumber: data sekunder diolah, 2014

Dari tabel 4.8 diatas dapat disimpulkan bahwa pada rasio desentralisasi fiskal setiap periode penelitiannya termasuk dalam kategori **sangat rendah**. Rasio ketergantungan setiap periode penelitiannya termasuk dalam kategori **tinggi**. Rasio kemandirian setiap periode penelitiannya termasuk dalam **kategori rendah sekali**. Rasio efektivitas setiap periode penelitiannya termasuk dalam kategori **efektif**. Rasio *share* setiap periode penelitiannya termasuk dalam kategori **sangat kurang**. Rasio *growht* setiap periode penelitiannya termasuk dalam kategori **sangat kurang**. Hal ini mendukung pengujian hipotesis

sebelumnya bahwa ternyata baik dari segi pengujian hipotesis dan penghitungan rasio tidak terdapat perbedaan kategori kinerja keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu ini.

4.2 Pembahasan dan Hasil Penelitian

Kinerja keuangan pemerintahan saat ini akan selalu menjadi sorotan utama bagi publik, hal ini dikarenakan dengan melihat kinerja pemerintah maka publik akan dapat mengetahui gambaran bagaimana pemerintah dapat menggunakan kewenangan yang dimilikinya saat ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan lebih memikirkan kepentingan rakyatnya. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam bentuk APBD yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga bisa berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, APBD dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Semua ini perlu dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat yang harus menjadi prioritas penting dalam penyusunan anggaran, mengingat masyarakat juga memiliki andil yang cukup besar dalam penerimaan suatu negara atau daerah yang tidak terlepas dari sumbangan masyarakat itu sendiri baik yang berupa pajak dan retribusi yang mempunyai persentase cukup besar terhadap penerimaan suatu daerah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Bengkulu baik kabupaten maupun kota semakin menurun sejak sepuluh tahun terakhir ini, diketahui dari enam rasio yang

digunakan peneliti dalam melihat kinerja keuangan hanya dua rasio yang mengalami peningkatan (*hipotesis nya diterima*) dari periode penelitian 2001-2006 dibandingkan dengan periode penelitian 2007-2012. Rasio tersebut ialah rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah, namun peningkatan ini tidak cukup signifikan karena dilihat dari kategori ukuran persentasenya tidak berubah tetap tergolong **sangat rendah** untuk rasio derajat desentralisasi fiskal dan **rendah sekali** untuk rasio kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pendapatan yang dihasilkan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta masih tingginya dana perimbangan dari pusat dimana sisa hasil anggaran tahun sebelumnya juga tergolong tinggi.

Empat rasio lainnya mengalami penurunan (*hipotesisnya ditolak*) dari periode penelitian 2001-2006 dibandingkan dengan periode penelitian 2007-2012 dan rasio tersebut adalah rasio ketergantungan keuangan daerah, hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) **semakin tinggi**, karena saat ini semakin rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio efektivitas keuangan daerah tergolong cukup efektif, karena pemerintah dianggap mampu dalam merealisasikan PAD dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio *growth* (pertumbuhan) PAD mengalami fluktuasi yang menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dalam

penerimaan PAD masih **sangat rendah** namun hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah, meski demikian peningkatan penerimaan PAD tidak secara otomatis meningkatkan rasio *share* (kontribusi) PAD dalam APBD sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi.

Berbeda lagi dengan perbandingan periode penelitian 1995-2000 dengan periode penelitian 2007-2012 bahwa pengujian hipotesis menunjukkan keenam rasio tersebut tidak mengalami perbedaan peningkatan secara signifikan, hipotesis tersebut ditolak karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,025. Kinerja keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu baik pada kabupaten maupun kota dilihat dari sisi tingkat desentralisasi fiskal masih **sangat rendah sekali** hal itu menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan pembangunan dari pemerintah pusat relatif tidak mengalami peningkatan, tetapi juga tidak mengalami penurunan. Dengan kata lain bahwa berlakunya otonomi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pada intinya desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian keuangan dalam penyelenggaraan urusan daerah, yaitu untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing daerah, semakin besar nilai derajat desentralisasi fiskal maka semakin besar kemandirian daerah dalam pendanaan pelaksanaan tugas daerah baik kegiatan rutin maupun pembangunan.

Berarti secara tidak langsung berhubungan dengan tingkat kemandirian yang terus mengalami penurunan. Hal ini bisa saja disebabkan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang melaksanakannya, sehingga sumber daya alam yang dimiliki tidak dapat dikembangkan dan dikelola secara maksimal.

Apabila kinerja keuangan dilihat dari rasio tingkat ketergantungan keuangan, maka periode 1995-2000 dan 2007-2012 atau sebelum dan sesudah otonomi daerah juga tidak mengalami perbedaan secara signifikan, tingkat ketergantungan masih dikategorikan **tinggi**. Artinya bahwa kemampuan pemerintah dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah relatif sama atau tidak ada peningkatan secara signifikan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah. Hal tersebut bahwa diberlakukannya otonomi daerah relatif tidak berpengaruh pada kemampuan pemerintah daerah se Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah nya.

Rasio efektifitas menunjukkan hasil yang sama, kondisi tersebut dapat dilihat dari komponen rasio efektifitas, pada saat target pendapatan asli daerah meningkat, tetapi kondisi riil justru sebaliknya, hal ini bisa saja disebabkan oleh sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang terbesar yaitu berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah belum bisa dimaksimalkan. Begitu juga dengan rasio *share* dan *growht* yang masih tergolong **sangat rendah**.

Kinerja keuangan pemerintah daerah se Provinsi Bengkulu dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah tidak mengalami perbedaan yang signifikan, karena tingkat kemandirian nya masih tergolong **rendah sekali**, dengan demikian adanya otonomi daerah di pemerintah baik kabupaten maupun kota tidak

mempengaruhi kemampuan keuangan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat juga disebabkan karena kondisi perekonomian di pemerintah daerah se Provinsi Bengkulu pada umumnya belum sepenuhnya kodusif, sehingga tingkat pendapatan dari wajib pajak relatif tidak stabil. Namun jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain nilai PAD kota Bengkulu jauh lebih besar, dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tetapi transfer pusat ditambah pinjaman juga mengalami peningkatan setiap tahunnya yang nilainya tidak sebanding.

Pemerintah daerah dalam era otonomi daerah memang mampu meningkatkan penerimaan PAD, akan tetapi penerimaan tersebut masih jauh dari yang diharapkan sehingga belum bisa memberikan kontribusi secara nyata bagi pembiayaan belanja pembangunan. Alasan yang dapat digunakan untuk menerangkan hal ini antara lain, pemerintah daerah dalam hal mendorong pertumbuhan PAD cenderung mengandalkan pajak dan retribusi yang didasarkan oleh peraturan daerah yang ditetapkan (Adi Priyo Hari, 2006). Permasalahannya, peraturan tersebut kurang mempertimbangkan kemampuan masyarakat sehingga terjadi kesenjangan dalam pelaksanaannya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Deddy (2010) bahwa untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui pajak dan retribusi tidak hanya mengandalkan peraturan daerah semata, tetapi juga melibatkan peningkatan kualitas SDM; penyiapan sarana/prasarana dasar dan pendukung; peraturan dan perundangan yang memperhatikan aspek ekonomi, efisiensi dan netralitas; revitalisasi lembaga-lembaga terkait, termasuk desentralisasi kewenangan perijinan investasi; kebijakan pemberian fasilitas

insentif kepada investor yang lebih menarik; dan optimalisasi potensi perekonomian lokal sehingga bermanfaat kepada daerah.

Adapun secara keseluruhan hasil dari penelitian analisis kinerja keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu dengan membandingkan beberapa periode penelitian yaitu 1995-2000 (sebelum otonomi daerah), 2001-2006 (krisis ekonomi), 2007-2012 (setelah otonomi daerah & setelah krisis ekonomi) dengan menggunakan uji beda (*paired sample t-test* dan *Wilcoxon Signed Ranks Test*) tersebut, secara keseluruhan berbanding terbalik dengan tujuan dari otonomi daerah yang sebenarnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk menguji apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah se provinsi Bengkulu baik kabupaten maupun kota, yang menggunakan 6 rasio yaitu : rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio share (kontribusi) PAD terhadap total belanja daerah, dan rasio growth (pertumbuhan) PAD, serta dengan menggunakan pengujian dari hasil uji beda *Paired Sample T-Test dan Wilcoxon Signed Ranks Test* pada rasio kinerja keuangan daerah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan pada rasio derajat desentralisasi fiskal dalam perbandingan pada tahun penelitian 2001-2006 dengan 2007-2012. Namun tidak terdapat perbedaan dalam perbandingan tahun penelitian 1995-2000 dengan 2007-2012. Hal ini tidak berbeda secara signifikan karena dilihat dari penghitungan rasio bahwa rasio nya masih dikategorikan **sangat rendah** setiap periode penelitiannya untuk tingkat derajat desentralisasi fiskal.
2. Tidak terdapat perbedaan pada rasio ketergantungan keuangan daerah dalam perbandingan pada tahun penelitian 2001-2006 dengan 2007-2012. Hal ini sama dengan perbandingan tahun penelitian 1995-2000 dengan 2007-2012 yang juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan. Hal ini didukung dari

penghitungan rasio bahwa rasio nya masih dikategorikan **tinggi** setiap periode penelitiannya untuk tingkat ketergantungan keuangan daerah.

3. Terdapat perbedaan pada rasio kemandirian dari aspek tingkat kemandirian dalam perbandingan pada tahun penelitian 2001-2006 dengan 2007-2012. Namun tidak terdapat perbedaan dalam perbandingan tahun penelitian 1995-2000 dengan 2007-2012. Hasil yang sama juga ditunjukkan bahwa baik kabupaten maupun kota tingkat kemandirian nya masih **rendah sekali** dalam periode penelitian 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012.
4. Sedangkan aspek efektivitas Tidak terdapat perbedaan pada rasio dalam perbandingan pada tahun penelitian 2001-2006 dengan 2007-2012. Hal ini sama dengan perbandingan tahun penelitian 1995-2000 dengan 2007-2012 yang juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan. Hal ini didukung dari penghitungan rasio bahwa rasio nya dikategorikan **efektif** setiap periode penelitiannya untuk tingkat efektivitas keuangan daerah.
5. Tidak terdapat perbedaan pada rasio *share* dalam perbandingan pada tahun penelitian 2001-2006 dengan 2007-2012. Hal ini sama dengan perbandingan tahun penelitian 1995-2000 dengan 2007-2012 yang juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan. Hal ini didukung dari penghitungan rasio bahwa rasio nya masih dikategorikan **sangat kurang** setiap periode penelitiannya untuk rasio *share*.
6. Tidak terdapat perbedaan pada rasio *growht* dalam perbandingan pada tahun penelitian 2001-2006 dengan 2007-2012. Hal ini sama dengan perbandingan tahun penelitian 1995-2000 dengan 2007-2012 yang juga menunjukkan tidak

terdapat perbedaan. Hal ini didukung dari penghitungan rasio bahwa rasio nya masih dikategorikan **sangat kurang** setiap periode penelitiannya untuk rasio *growth*. Hasilnya menunjukkan di setiap kabupaten maupun kota selalu mengalami fluktuatif, yaitu terjadi peningkatan namun tidak signifikan karena masih tergolong **sangat kurang**.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya, terdapat beberapa saran yang diajukan penulis, diantaranya :

1. Untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri, dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikuasai pemerintah pusat maupun provinsi selain itu meningkatkan total penerimaan daerah di masing-masing daerah kabupaten maupun kota dengan peningkatan jumlah pendapatan dan penerimaan pembiayaan, serta meningkatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah dan tentu saja peran pemerintah sangat dibutuhkan dengan membuat kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang tetap berada dalam batasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan upaya peningkatan penerimaan PAD tidak semata-mata mengandalkan pajak dan retribusi tetapi juga mengoptimalkan aspek-aspek lainnya, seperti peningkatan kualitas SDM; penyiapan sarana/prasarana dasar dan pendukung; peraturan dan perundangan yang memperhatikan aspek ekonomi dan desentralisasi kewenangan perijinan investasi; kebijakan pemberian fasilitas insentif kepada investor yang lebih menarik; dan optimalisasi potensi perekonomian lokal sehingga bermanfaat kepada daerah.
3. Secara keseluruhan pada dasarnya tujuan pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dan salah satu hal yang paling penting adalah dengan meningkatkan penerimaan daerah karena dalam membangun suatu daerah menggunakan dana yang berasal dari daerah itu sendiri.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini daya generalisasi rendah karena hanya menggunakan unit analisis di pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu saja. Karena alasan kelengkapan data, sehingga kesimpulan yang bisa diambil hanya bisa diterapkan di pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu yang bukan merupakan daerah pemekaran.

2. Untuk penelitian selanjutnya bisa ditambahkan analisis atau pengukuran lainnya karena penelitian ini hanya menggunakan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dengan enam alat ukur rasio.

5.4 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian yang lebih luas, sehingga dapat menilai kinerja keuangan di seluruh Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir ini. Penelitian lain dapat juga dilakukan secara empiris dengan melihat bagaimana kabupaten yang dimekarkan dari kabupaten induk sehingga bisa diketahui bagaimana perkembangan kabupaten yang dimekarkan setelah berpisah dengan kabupaten induk.
2. Alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah bisa ditambahkan tidak hanya menggunakan rasio atau analisis pendapatan saja, tapi bisa menggunakan analisis belanja dan analisis pembiayaan sehingga kesimpulan yang dihasilkan lebih akurat dan tidak hanya dari pendapatan saja.
3. Adapun yang menjadi temuan secara umum yang berkaitan dengan penelitian ini adalah akibat terjadinya pemekaran kabupaten/kota, sehingga banyak daerah yang mengalami penurunan anggaran dan penurunan pendapatan asli daerah akibat semakin kecilnya daerah yang diatur oleh pemerintahan kabupaten/kota ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrendi, Ahmad Fajri. 2013. *Analisis Hubungan PAD, Transfer Pemerintah Pusat dengan Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Bengkulu*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Bengkulu. Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Dwiranda, A.A.N.B. 2007. *Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali*. (online). (diakses pada tanggal 28 Desember 2013) tersedia di world wide web: <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/aanb%20dwiranda.pdf>.
- Frediyanto, Yanuar. 2010. *Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Semarang.Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip.
- Halim, A. 2004. *Bunga rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Kaho, J.R. 1998. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Lestari, Famela Mulya. 2012. *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kemandirian Daerah Pada Kabupaten Bengkulu Tengah*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nataludin. 2001. *Potensi Dana Perimbangan Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Jambi*. Dalam Abdul Halim [Ed].Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Permana, Septi Ernely. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Bengkulu. Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.

Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.

_____, 2004. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

Ritonga & Alam. *Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mencalonkan Kembali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)*. SNA XII. Purwokerto. 2010.

Roberts, Robin W. 1992. *Determinants Of Corporate Social Responsibility Disclosure: An Application Of Stakeholder Theory*. Accounting Organizations and Society. University of Missouri-Columbia.

Setiaji, W. dan Adi, P.H. 2007. Peta kemampuan keuangan daerah sesudah otonomi daerah : apakah mengalami pergeseran? (studi pada kabupaten dan kota se Jawa – Bali). Simposium Akuntansi X, Makassar.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta Bandung.

Syafrizal, Hakky. 2013. *Pengaruh Politisasi Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Daerah Incumbent di Pulau Jawa dan Daerah Incumbent Luar Pulau Jawa*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Bengkulu. Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.

Valentina, Miera. 2009. *Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Bengkulu Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Bengkulu. Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.

www.djkg.depkeu.go.id

www.perpustakaan.bappenas.go.id

LAMPIRAN

Lampiran 1

1.1 Data Tahun 2007-2012

TAHUN	Nama Daerah	Perbedaan	RDF	RkKD	RKKD	REKD	RS	RG
2012	K.BKL	1	0,092792	0,571092	0,162481	0,08095	1,912456	0,177048
	KAB.RL	1	0,047363	0,386341	0,122594	0,041036	0,303291	-0,1629
	KAB. BS	1	0,029328	0,634178	0,046246	0,024736	0,647433	-0,03322
	KAB. BU	1	0,047862	0,75088	0,063741	0,040668	1,089218	0,049719
2011	K.BKL	1	0,093354	0,906646	0,102966	1,18457	0,078249	0,1223
	KAB.RL	1	0,06542	1,138986	0,057437	1,557784	0,562724	-0,00626
	KAB. BS	1	0,036803	1,178366	0,031232	0,971819	0,030084	-0,05574
	KAB. BU	1	0,350719	9,099405	0,038543	1,291283	0,041753	0,180024
2010	K.BKL	1	0,092954	1,140091	0,081533	1,555587	0,076365	0,218139
	KAB.RL	1	0,071874	1,202574	0,083951	0,995545	0,062819	0,729559
	KAB. BS	1	0,042771	0,962067	0,044457	1,277037	0,038314	-0,12661
	KAB. BU	1	0,05103	1,150561	0,044353	1,026805	0,042652	0,048986
2009	K.BKL	1	0,074987	0,924153	0,081141	1,214688	0,068002	0,386995
	KAB.RL	1	0,043395	1,109279	0,03912	0,90446	0,036585	0,014872
	KAB. BS	1	0,048631	1,227326	0,039624	0,788993	0,046429	0,080863
	KAB. BU	1	0,046744	0,810524	0,057672	1,492379	0,044663	0,106889
2008	K.BKL	1	0,050583	0,859088	0,05888	0,819317	0,055843	0,373298
	KAB.RL	1	0,043339	0,957336	0,045271	0,865763	0,033872	-0,00624
	KAB. BS	1	0,043744	0,97583	0,044828	1,24667	0,041816	0,078842
	KAB. BU	1	0,03664	1,032935	0,035472	1,125467	0,032607	0,424528
2007	K.BKL	1	0,040813	0,864296	0,047221	0,800494	0,059673	0,070851
	KAB.RL	1	0,25993	5,161293	0,050362	1,175998	0,064845	0,301205
	KAB. BS	1	0,03071	0,660598	0,046482	0,984705	0,070267	0,664816
	KAB. BU	1	0,03230	1,103531	0,029269	1,006223	0,041538	0,463735
Rata-rata			0,07392	1,450307	0,06062	0,936374	0,228396	0,170905

1.2 Data Tahun 2001-2006

TAHUN	Nama Daerah	Perbedaan	RDF	RkKD	RKKD	REKD	RS	RG
2006	K.BKL	2	0,047164	0,917876	0,051384	0,834001	0,052521	0,199852
	KAB.RL	2	0,040616	0,933302	0,043518	1,226187	0,048213	0,547679
	KAB. BS	2	0,029769	0,917648	0,032441	1,093947	0,034754	0,639884
	KAB. BU	2	0,024037	0,968166	0,024828	1	0,024172	3,162853
2005	K.BKL	2	0,061584	0,884003	0,069665	0,833383	64,7317	-0,09579
	KAB.RL	2	0,050732	1,859352	0,028118	0,8306	0,052282	0
	KAB. BS	2	0,040983	2,751902	0,019782	0,891909	0,040983	0
	KAB. BU	2	0,017592	2,949629	0,005964	0,9332	0,019478	1,486151
2004	K.BKL	2	0,071033	0,829343	0,085649	0,879598	0,072235	0,589429
	KAB.RL	2	0,050732	1,320469	0,03842	0,545063	0,043136	0,175611
	KAB. BS	2	0,040678	0,821606	0,04951	0,702127	0,044028	0,18882
	KAB. BU	2	0,003812	0,853488	0,004325	0,182194	0,003692	-0,90543
2003	K.BKL	2	0,044092	0,812191	0,054288	1,235798	0,048197	0,424078
	KAB.RL	2	0,028842	0,828512	0,033016	0,906002	0,042756	0,231603
	KAB. BS	2	0,017489	1,001463	0,017918	0,634257	0,017489	-0,24909
	KAB. BU	2	0,028812	0,782229	0,036696	1,67977	0,047207	0,316382
2002	K.BKL	2	0,041824	0,851491	0,049118	1,311492	0,067069	0,315577
	KAB.RL	2	0,028692	0,868699	0,033029	1,013482	0,042478	0,351784
	KAB. BS	2	0,027083	0,859002	0,031529	0,693294	0,036412	0,459746
	KAB. BU	2	0,029449	0,774603	0,038019	1,306103	0,046573	-0,57485
2001	K.BKL	2	0,049856	0,75514	0,066022	0,961453	0,060705	0,252507
	KAB.RL	2	0,026578	0,912005	0,029142	0,983755	0,03613	0,517363
	KAB. BS	2	0,019704	0,941662	0,020925	0,933553	0,032041	2,214834
	KAB. BU	2	0,086216	0,865312	0,099636	0,951199	0,127334	6,34352
Rata-rata			0,037807	1,094131	0,040123	0,940099	2,740483	0,691355

1.3 Data Tahun 1995-2000

TAHUN	Nama Daerah	Perbedaan	RDF	RkKD	RKKD	REKD	RS	RG
1999/2000	K.BKL	3	0,080572	0,791741	0,101766	0,981262	0,139921	0,700887
	KAB.RL	3	0,037362	0,908214	0,041138	0,858932	0,059506	1,073647
	KAB. BS	3	0,016228	0,935859	0,017341	0,864455	0,023107	-0,4213
	KAB. BU	3	0,023408	0,907997	0,02578	0,920481	0,04276	0,314659
1998/1999	K.BKL	3	0,042566	0,827377	0,076336	0,620593	0,067578	-0,41359
	KAB.RL	3	0,020124	0,973494	0,020672	0,894038	0,041618	-0,37001
	KAB. BS	3	0,082913	0,765428	0,108322	0,924023	0,142006	0,521725
	KAB. BU	3	0,02605	0,918259	0,028369	0,790022	0,040307	0,201281
1997/1998	K.BKL	3	0,126613	0,733702	0,172567	0,947083	0,233702	0,082688
	KAB.RL	3	0,043216	0,908879	0,047548	0,935901	0,074201	0,176396
	KAB. BS	3	0,024633	0,928979	0,026516	0,884629	0,044561	0,056674
	KAB. BU	3	0,024789	0,948019	0,026148	0,925096	0,047729	0,627248
1996/1997	K.BKL	3	0,133804	0,683192	0,195851	1,141917	0,26427	0,165694
	KAB.RL	3	0,04499	0,899752	0,050003	0,976628	0,076178	-0,24252
	KAB. BS	3	0,030273	0,947609	0,031947	0,933959	0,050673	0,521194
	KAB. BU	3	0,019421	0,943258	0,020589	0,851827	0,036496	0,233117
1995/1996	K.BKL	3	0,137226	0,707886	0,193853	0,955262	0,275918	0,259584
	KAB.RL	3	0,071248	0,908184	0,078451	0,966754	0,116285	0,019214
	KAB. BS	3	0,025232	0,964853	0,026151	0,92008	0,039186	0,850371
	KAB. BU	3	0,018997	0,966845	0,019648	0,921109	0,033973	0,233117
1994/1995	K.BKL	3	0,136402	0,805155	0,169411	0,759679	0,256478	0
	KAB.RL	3	0,082624	0,901799	0,091621	0,961376	0,140647	0
	KAB. BS	3	0,017033	0,972852	0,017508	0,954696	0,026943	0
	KAB. BU	3	0,020373	0,965654	0,021098	1,379126	0,040552	0
Rata-rata			0,053587	0,883958	0,067026	0,927872	0,096441	0,191253

Lampiran 1.4

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah

Nama Daerah	PAD	Total Penerimaan Daerah	Hasil	Rasio (%)
2012				
Kota Bengkulu	54.820.968.854	590.795.020.202,00	0,0927919	9,28
Kab. Rejang lebong	25.886.241.431	546.549.665.900,00	0,0473630	4,74
Kab. Bengkulu Selatan	13.866.048.560	472.791.174.998,00	0,0293281	2,93
Kab. Bengkulu Utara	25.888.700.000	540.906.195.461,00	0,0478617	4,79
2011				
Kota Bengkulu	46.574.964.682	498.909.261.030,00	0,0933536	9,34
Kab. Rejang lebong	30.923.582.372	472.692.669.988,00	0,0654201	6,54
Kab. Bengkulu Selatan	14.342.487.760	389.709.101.590,00	0,0368031	3,68
Kab. Bengkulu Utara	24.662.500.000	70.319.856.000,00	0,3507189	35,07
2010				
Kota Bengkulu	41.499.566.156	446.450.371.609,00	0,0929545	9,30
Kab. Rejang lebong	31.118.232.279	432.957.627.886,00	0,0718736	7,19
Kab. Bengkulu Selatan	15.189.124.113	355.126.738.413,00	0,0427710	4,28
Kab. Bengkulu Utara	20.900.000.000	409.560.182.000,00	0,0510304	5,10
2009				
Kota Bengkulu	34.068.000.000	454.321.000.000,00	0,0749866	7,50
Kab. Rejang lebong	17.992.000.000	414.608.000.000,00	0,0433952	4,34
Kab. Bengkulu Selatan	17.391.000.000	357.611.000.000,00	0,0486311	4,86
Kab. Bengkulu Utara	19.924.000.000	426.234.000.000,00	0,0467443	4,67
2008				
Kota Bengkulu	24.562.456.079	485.585.673.316,17	0,0505832	5,06
Kab. Rejang lebong	17.728.348.575	409.059.088.575,00	0,0433393	4,33
Kab. Bengkulu Selatan	16.089.927.571	367.816.847.571,00	0,0437444	4,37
Kab. Bengkulu Utara	18.000.002.000	491.267.530.000,00	0,0366399	3,66
2007				
Kota Bengkulu	17.885.739.044,15	438.237.073.315,19	0,0408129	4,08
Kab. Rejang lebong	17.839.691.984,14	68.631.500.477,34	0,2599345	25,99
Kab. Bengkulu Selatan	14.914.070.962,72	485.711.826.487,14	0,0307056	3,07
Kab. Bengkulu Utara	12.635.764.022,44	391.209.999.608,54	0,0322992	3,23
2006				
Kota Bengkulu	16.702.355.180,00	354.133.686.117,04	0,0471640	4,72
Kab. Rejang lebong	13.710.130.000,00	337.556.990.000,00	0,0406157	4,06
Kab. Bengkulu Selatan	8.958.390.000,00	300.926.010.000,00	0,0297694	2,98
Kab. Bengkulu Utara	8.632.550.000,00	359.130.540.000,00	0,0240374	2,40
2005				
Kota Bengkulu	13.920.344.968,08	226.036.553.415,36	0,0615845	6,16
Kab. Rejang lebong	8.858.510.000,00	174.614.660.000,00	0,0507318	5,07
Kab. Bengkulu Selatan	5.462.820.000,00	133.294.140.000,00	0,0409832	4,10
Kab. Bengkulu Utara	2.073.710.000,00	117.878.570.000,00	0,0175919	1,76
2004				
Kota Bengkulu	15.394.973.809,39	216.730.784.314,57	0,0710327	7,10
Kab. Rejang lebong	8.858.510.000,00	174.614.660.000,00	0,0507318	5,07
Kab. Bengkulu Selatan	5.462.820.000,00	134.294.140.000,00	0,0406780	4,07
Kab. Bengkulu Utara	834.104.724,20	218.801.026.358,50	0,0038122	0,38

2003				
Kota Bengkulu	9.685.850.000,00	219.672.930.000,00	0,0440921	4,41
Kab. Rejang lebong	7.535.240.000,00	261.260.420.000,00	0,0288419	2,88
Kab. Bengkulu Selatan	4.595.160.000,00	262.743.860.000,00	0,0174891	1,75
Kab. Bengkulu Utara	8.820.170.000,00	306.129.150.000,00	0,0288119	2,88
2002				
Kota Bengkulu	6.801.490.000,00	162.622.500.000,00	0,0418238	4,18
Kab. Rejang lebong	6.118.240.000,00	213.235.370.000,00	0,0286924	2,87
Kab. Bengkulu Selatan	6.119.430.000,00	225.947.790.000,00	0,0270834	2,71
Kab. Bengkulu Utara	6.700.310.000,00	227.519.120.000,00	0,0294494	2,94
2001				
Kota Bengkulu	5.169.968.209,64	103.697.835.181,87	0,0498561	4,99
Kab. Rejang lebong	4.526.050.000,00	170.295.060.000,00	0,0265777	2,66
Kab. Bengkulu Selatan	4.192.120.000,00	212.750.860.000,00	0,0197044	1,97
Kab. Bengkulu Utara	15.759.690.000,00	182.793.080.000,00	0,0862160	8,62
1999/2000				
Kota Bengkulu	4.127.696.013,29	51.229.713.945,45	0,0805723	8,06
Kab. Rejang lebong	2.982.838.774,00	79.836.240.310,00	0,0373620	3,74
Kab. Bengkulu Selatan	1.303.992.832,00	80.352.146.250,00	0,0162285	1,62
Kab. Bengkulu Utara	2.146.067.620,00	91.680.016.459,00	0,0234082	2,34
1998/1999				
Kota Bengkulu	2.426.790.590,00	57.011.798.430,00	0,0425665	4,26
Kab. Rejang lebong	1.438.450.871,00	71.478.821.176,00	0,0201242	2,01
Kab. Bengkulu Selatan	2.253.325.220,00	27.177.066.260,00	0,0829127	8,29
Kab. Bengkulu Utara	1.632.413.471,00	62.663.968.911,00	0,0260503	2,61
1997/1998				
Kota Bengkulu	4.138.370.690,70	32.685.209.262,76	0,1266129	12,66
Kab. Rejang lebong	2.283.273.761,74	52.834.594.545,36	0,0432155	4,32
Kab. Bengkulu Selatan	1.480.770.559,57	60.112.717.182,19	0,0246332	2,46
Kab. Bengkulu Utara	1.358.894.482,46	54.819.461.063,84	0,0247885	2,48
1996/1997				
Kota Bengkulu	3.822.310.973,23	28.566.566.785,69	0,1338037	13,38
Kab. Rejang lebong	1.940.906.054,00	43.140.953.708,00	0,0449899	4,50
Kab. Bengkulu Selatan	1.401.349.882,00	46.289.884.130,00	0,0302734	3,03
Kab. Bengkulu Utara	835.087.733,00	42.999.315.568,00	0,0194210	1,94
1995/1996				
Kota Bengkulu	3.279.001.156,44	23.894.895.939,22	0,1372260	13,72
Kab. Rejang lebong	2.562.308.975,66	35.963.264.103,33	0,0712480	7,12
Kab. Bengkulu Selatan	921.216.951,30	36.510.363.159,79	0,0252317	2,52
Kab. Bengkulu Utara	677.217.114,04	35.649.009.234,70	0,0189968	1,90
1994/1995				
Kota Bengkulu	2.603.242.243	19.085.058.993,00	0,1364021	13,64
Kab. Rejang lebong	2.514.003.807	30.427.128.766,00	0,0826238	8,26
Kab. Bengkulu Selatan	497.855.167	29.228.750.561,00	0,0170331	1,70
Kab. Bengkulu Utara	653.270.244	32.065.494.816,00	0,0203730	2,04

Sumber: Data di olah sendiri (2014)

Lampiran 1.5

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Nama Daerah	Pendapatan Transfer	Total Penerimaan Daerah	Hasil	Rasio (%)
2012				
Kota Bengkulu	337.398.601.586,36	590.795.020.202,00	0,5710925	57,11
Kab. Rejang lebong	211.154.544.242,00	546.549.665.900,00	0,3863410	38,63
Kab. Bengkulu Selatan	299.833.940.842,50	472.791.174.998,00	0,6341784	63,42
Kab. Bengkulu Utara	406.155.662.000,00	540.906.195.461,00	0,7508800	75,09
2011				
Kota Bengkulu	452.334.296.348	498.909.261.030,00	0,9066464	90,66
Kab. Rejang lebong	538.390.353.265,07	472.692.669.988,00	1,1389860	113,90
Kab. Bengkulu Selatan	459.219.786.125,78	389.709.101.590,00	1,1783656	117,84
Kab. Bengkulu Utara	639.868.834.913,41	70.319.856.000,00	9,0994048	909,94
2010				
Kota Bengkulu	508.994.029.892,71	446.450.371.609,00	1,1400910	114,01
Kab. Rejang lebong	520.663.424.469	432.957.627.886,00	1,2025736	120,26
Kab. Bengkulu Selatan	341.655.587.953	355.126.738.413,00	0,9620666	96,21
Kab. Bengkulu Utara	471.223.956.635,44	409.560.182.000,00	1,1505610	115,06
2009				
Kota Bengkulu	419.862.232.849,92	454.321.000.000,00	0,9241533	92,42
Kab. Rejang lebong	459.915.928.576,98	414.608.000.000,00	1,1092790	110,93
Kab. Bengkulu Selatan	438.905.379.151,44	357.611.000.000,00	1,2273263	122,73
Kab. Bengkulu Utara	345.473.061.746,47	426.234.000.000,00	0,8105244	81,05
2008				
Kota Bengkulu	417.160.975.794,99	485.585.673.316,17	0,8590883	85,91
Kab. Rejang lebong	391.607.027.707,90	409.059.088.575,00	0,9573361	95,73
Kab. Bengkulu Selatan	358.926.648.639,00	367.816.847.571,00	0,9758298	97,58
Kab. Bengkulu Utara	507.447.460.750,99	491.267.530.000,00	1,0329351	103,29
2007				
Kota Bengkulu	378.766.513.846,00	438.237.073.315,19	0,8642959	86,43
Kab. Rejang lebong	354.227.253.487	68.631.500.477,34	5,1612926	516,13
Kab. Bengkulu Selatan	320.860.128.237,38	485.711.826.487,14	0,6605977	66,06
Kab. Bengkulu Utara	431.712.521.173,00	391.209.999.608,54	1,1035314	110,35
2006				
Kota Bengkulu	325.050.746.367,98	354.133.686.117,04	0,9178758	91,79
Kab. Rejang lebong	315.042.570.000,00	337.556.990.000,00	0,9333019	93,33
Kab. Bengkulu Selatan	276.144.210.000,00	300.926.010.000,00	0,9176482	91,76
Kab. Bengkulu Utara	347.697.990.000,00	359.130.540.000,00	0,9681660	96,82
2005				
Kota Bengkulu	199.817.066.204,34	226.036.553.415,36	0,8840033	88,40
Kab. Rejang lebong	315.042.570.000	169.436.730.000,00	1,8593523	185,94
Kab. Bengkulu Selatan	276.144.210.000	100.346.660.000,00	2,7519024	275,19
Kab. Bengkulu Utara	347.697.990.000	117.878.570.000,00	2,9496285	294,96
2004				
Kota Bengkulu	179.744.133.519,00	216.730.784.314,57	0,8293429	82,93
Kab. Rejang lebong	230.573.180.000,00	174.614.660.000,00	1,3204686	132,05
Kab. Bengkulu Selatan	110.336.900.000,00	134.294.140.000,00	0,8216062	82,16
Kab. Bengkulu Utara	192.844.114.700,00	225.948.252.793,00	0,8534880	85,35
2003				
Kota Bengkulu	178.416.310.000,00	219.672.930.000,00	0,8121907	81,22
Kab. Rejang lebong	228.228.210.000,00	275.467.760.000,00	0,8285115	82,85

Kab. Bengkulu Selatan	256.459.930.000,00	256.085.190.000,00	1,0014633	100,15
Kab. Bengkulu Utara	240.354.660.000,00	307.244.840.000,00	0,7822903	78,23
2002				
Kota Bengkulu	138.471.530.000,00	162.622.500.000,00	0,8514906	85,15
Kab. Rejang lebong	185.237.430.000,00	213.235.370.000,00	0,8686994	86,87
Kab. Bengkulu Selatan	194.089.500.000,00	225.947.790.000,00	0,8590015	85,90
Kab. Bengkulu Utara	176.237.020.000,00	227.519.120.000,00	0,7746031	77,46
2001				
Kota Bengkulu	78.306.416.522,40	103.697.835.181,87	0,7551403	75,51
Kab. Rejang lebong	155.309.870.000,00	170.295.060.000,00	0,9120046	91,20
Kab. Bengkulu Selatan	200.339.440.000,00	212.750.860.000,00	0,9416622	94,17
Kab. Bengkulu Utara	158.173.030.000,00	182.793.080.000,00	0,8653119	86,53
1999/2000				
Kota Bengkulu	40.560.664.700,74	51.229.713.945,45	0,7917410	79,17
Kab. Rejang lebong	72.508.368.048,00	79.836.240.310,00	0,9082137	90,82
Kab. Bengkulu Selatan	75.198.295.796,00	80.352.146.250,00	0,9358592	93,59
Kab. Bengkulu Utara	83.245.143.555,00	91.680.016.459,00	0,9079966	90,80
1998/1999				
Kota Bengkulu	31.790.796.527,50	38.423.584.684,95	0,8273772	82,74
Kab. Rejang lebong	69.584.226.305	71.478.821.176,00	0,9734943	97,35
Kab. Bengkulu Selatan	20.802.100.422	27.177.066.260,00	0,7654285	76,54
Kab. Bengkulu Utara	57.541.754.552	62.663.968.911,00	0,9182590	91,83
1997/1998				
Kota Bengkulu	23.981.190.860,34	32.685.209.711,72	0,7337016	73,37
Kab. Rejang lebong	48.020.260.046,64	52.834.594.545,36	0,9088791	90,89
Kab. Bengkulu Selatan	55.843.430.496,70	60.112.717.182,19	0,9289786	92,90
Kab. Bengkulu Utara	51.969.873.852,98	54.819.461.063,84	0,9480187	94,80
1996/1997				
Kota Bengkulu	19.516.457.175,00	28.566.566.785,69	0,6831923	68,32
Kab. Rejang lebong	38.816.160.536,00	43.140.953.708,00	0,8997520	89,98
Kab. Bengkulu Selatan	43.864.703.414	46.289.884.130,00	0,9476088	94,76
Kab. Bengkulu Utara	40.559.428.885,00	42.999.315.568,00	0,9432575	94,33
1995/1996				
Kota Bengkulu	16.914.855.739,00	23.894.895.939,22	0,7078857	70,79
Kab. Rejang lebong	32.661.257.063,49	35.963.264.103,33	0,9081839	90,82
Kab. Bengkulu Selatan	35.227.117.586,85	36.510.363.159,79	0,9648526	96,49
Kab. Bengkulu Utara	34.467.074.774,00	35.649.009.234,70	0,9668452	96,68
1994/1995				
Kota Bengkulu	15.366.426.124,00	19.085.058.993,00	0,8051548	80,52
Kab. Rejang lebong	27.439.140.735,00	30.427.128.766,00	0,9017986	90,18
Kab. Bengkulu Selatan	28.435.245.750,00	29.228.750.561,00	0,9728519	97,29
Kab. Bengkulu Utara	30.964.180.630,00	32.065.494.816,00	0,9656542	96,57

Sumber: Data di olah sendiri (2014)

Lampiran 1.6

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Nama Daerah	PAD	Transfer Pusat + Pinjaman	Hasil	Rasio (%)
2012				
Kota Bengkulu	54.820.968.854	337.398.601.586,36	0,162481316	16,25
Kab. Rejang lebong	25.886.241.431	211.154.544.242,00	0,122593816	12,26
Kab. Bengkulu Selatan	13.866.048.560	299.833.940.842,50	0,04624576	4,62
Kab. Bengkulu Utara	25.888.700.000	406.155.662.000	0,063740832	6,37
2011				
Kota Bengkulu	46.574.964.682	452.334.296.348	0,102965804	10,30
Kab. Rejang lebong	30.923.582.372	538.390.353.265,07	0,057437103	5,74
Kab. Bengkulu Selatan	14.342.487.760	459.219.786.125,78	0,031232295	3,12
Kab. Bengkulu Utara	24.662.500.000	639.868.834.913,41	0,038543055	3,85
2010				
Kota Bengkulu	41.499.566.156	508.994.029.892,71	0,08153252	8,15
Kab. Rejang lebong	31.118.232.279	370.669.249.255,43	0,083951481	8,40
Kab. Bengkulu Selatan	15.189.124.113	341.655.587.953	0,044457415	4,45
Kab. Bengkulu Utara	20.900.000.000	471.223.956.635,44	0,044352584	4,44
2009				
Kota Bengkulu	34.068.000.000	419.862.232.849,92	0,081140901	8,11
Kab. Rejang lebong	17.992.000.000	459.915.928.576,98	0,039120193	3,91
Kab. Bengkulu Selatan	17.391.000.000	438.905.379.151,44	0,039623575	3,96
Kab. Bengkulu Utara	19.924.000.000	345.473.061.746,47	0,057671646	5,77
2008				
Kota Bengkulu	24.562.456.079	417.160.975.795	0,058880043	5,89
Kab. Rejang lebong	17.728.348.575	391.607.027.707,90	0,045270762	4,53
Kab. Bengkulu Selatan	16.089.927.571	358.926.648.639,00	0,044827899	4,48
Kab. Bengkulu Utara	18.000.002.000	507.447.460.750,99	0,035471656	3,55
2007				
Kota Bengkulu	17.885.739.044,15	378.766.513.846,00	0,047221015	4,72
Kab. Rejang lebong	17.839.691.984,14	354.227.253.487	0,05036228	5,04
Kab. Bengkulu Selatan	14.914.070.962,72	320.860.128.237,38	0,046481534	4,65
Kab. Bengkulu Utara	12.635.764.022,44	431.712.521.173,00	0,029268931	2,93
2006				
Kota Bengkulu	16.702.355.180,00	325.050.746.367,98	0,051383839	5,14
Kab. Rejang lebong	13.710.130.000,00	315.042.570.000,00	0,043518341	4,35
Kab. Bengkulu Selatan	8.958.390.000,00	276.144.210.000,00	0,032440984	3,24
Kab. Bengkulu Utara	8.632.550.000,00	347.697.990.000,00	0,024827725	2,48
2005				
Kota Bengkulu	13.920.344.968,08	199.817.066.204,34	0,069665446	6,97
Kab. Rejang lebong	8.858.510.000,00	315.042.570.000	0,028118454	2,81
Kab. Bengkulu Selatan	5.462.820.000,00	276.144.210.000	0,01978249	1,98
Kab. Bengkulu Utara	2.073.710.000,00	347.697.990.000	0,005964113	0,60
2004				
Kota Bengkulu	15.394.973.809,39	179.744.133.519,00	0,085649381	8,56
Kab. Rejang lebong	8.858.510.000,00	230.573.180.000,00	0,038419516	3,84
Kab. Bengkulu Selatan	5.462.820.000,00	110.336.900.000,00	0,049510363	4,95
Kab. Bengkulu Utara	834.104.724,20	192.844.114.700,00	0,00432528	0,43
2003				
Kota Bengkulu	9.685.850.000,00	178.416.310.000,00	0,054287918	5,43
Kab. Rejang lebong	7.535.240.000,00	228.228.210.000,00	0,033016252	3,30

Kab. Bengkulu Selatan	4.595.160.000,00	256.459.930.000,00	0,017917653	1,79
Kab. Bengkulu Utara	8.820.170.000,00	240.354.660.000,00	0,03669648	3,67
2002				
Kota Bengkulu	6.801.490.000,00	138.471.530.000,00	0,049118328	4,91
Kab. Rejang lebong	6.118.240.000,00	185.237.430.000,00	0,033029178	3,30
Kab. Bengkulu Selatan	6.119.430.000,00	194.089.050.000,00	0,031528981	3,15
Kab. Bengkulu Utara	6.700.310.000,00	176.237.020.000,00	0,038018743	3,80
2001				
Kota Bengkulu	5.169.968.209,64	78.306.416.522,40	0,066022281	6,60
Kab. Rejang lebong	4.526.050.000,00	155.309.870.000,00	0,029142063	2,91
Kab. Bengkulu Selatan	4.192.120.000,00	200.339.440.000,00	0,020925086	2,09
Kab. Bengkulu Utara	15.759.690.000,00	158.173.030.000,00	0,09963576	9,96
1999/2000				
Kota Bengkulu	4.127.696.013,29	40.560.664.700,74	0,101765985	10,18
Kab. Rejang lebong	2.982.838.774,00	72.508.368.048,00	0,041137856	4,11
Kab. Bengkulu Selatan	1.303.992.832,00	75.198.295.796,00	0,017340723	1,73
Kab. Bengkulu Utara	2.146.067.620,00	83.245.143.555,00	0,025780094	2,58
1998/1999				
Kota Bengkulu	2.426.790.590,00	31.790.796.527,50	0,076336263	7,63
Kab. Rejang lebong	1.438.450.871,00	69.584.226.305	0,020672083	2,07
Kab. Bengkulu Selatan	2.253.325.220,00	20.802.100.422	0,108322005	10,83
Kab. Bengkulu Utara	1.632.413.471,00	57.541.754.552	0,028369199	2,84
1997/1998				
Kota Bengkulu	4.138.370.690,70	23.981.190.860,34	0,172567356	17,26
Kab. Rejang lebong	2.283.273.761,74	48.020.260.046,64	0,047548134	4,75
Kab. Bengkulu Selatan	1.480.770.559,57	55.843.430.496,70	0,026516468	2,65
Kab. Bengkulu Utara	1.358.894.482,46	51.969.873.852,98	0,026147735	2,61
1996/1997				
Kota Bengkulu	3.822.310.973,23	19.516.457.175,00	0,195850658	19,59
Kab. Rejang lebong	1.940.906.054,00	38.816.160.536,00	0,050002525	5,00
Kab. Bengkulu Selatan	1.401.349.882,00	43.864.703.414	0,031947096	3,19
Kab. Bengkulu Utara	835.087.733,00	40.559.428.885,00	0,020589238	2,06
1995/1996				
Kota Bengkulu	3.279.001.156,44	16.914.855.739,00	0,193853333	19,39
Kab. Rejang lebong	2.562.308.975,66	32.661.257.063,49	0,078451021	7,85
Kab. Bengkulu Selatan	921.216.951,30	35.227.117.586,85	0,02615079	2,62
Kab. Bengkulu Utara	677.217.114,04	34.467.074.774,00	0,019648233	1,96
1994/1995				
Kota Bengkulu	2.603.242.243	15.366.426.124,00	0,169411041	16,94
Kab. Rejang lebong	2.514.003.807	27.439.140.735,00	0,091621084	9,16
Kab. Bengkulu Selatan	497.855.167	28.435.245.750,00	0,017508383	1,75
Kab. Bengkulu Utara	653.270.244	30.964.180.630,00	0,021097611	2,11

Sumber: Data di olah sendiri (2014)

Lampiran 1.7

Rasio Efektivitas PAD

Nama Daerah	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Hasil	Rasio (%)
2012				
Kota Bengkulu	54.820.968.854	677.219.000.000	0,08095	8,10
Kab. Rejang lebong	25.886.241.431	630.816.000.000	0,04104	4,10
Kab. Bengkulu Selatan	13.866.048.560	560.561.000.000	0,02474	2,47
Kab. Bengkulu Utara	25.888.700.000	636.580.000.000	0,04067	4,07
2011				
Kota Bengkulu	46.574.964.682	39.318.037.209,63	1,18457	118,46
Kab. Rejang lebong	30.923.582.372	19.851.004.770,20	1,55778	155,78
Kab. Bengkulu Selatan	14.342.487.760	14.758.401.174,70	0,97182	97,18
Kab. Bengkulu Utara	24.662.500.000	19.099.215.920,70	1,29128	129,13
2010				
Kota Bengkulu	41.499.566.156	26.677.744.840,91	1,55559	155,56
Kab. Rejang lebong	31.118.232.279	31.257.480.123	0,99555	99,55
Kab. Bengkulu Selatan	15.189.124.113	11.894.036.694	1,27704	127,70
Kab. Bengkulu Utara	20.900.000.000	20.354.406.066,04	1,0268	102,68
2009				
Kota Bengkulu	34.068.000.000	28.046.719.319	1,21469	121,47
Kab. Rejang lebong	17.992.000.000	19.892.527.742	0,90446	90,45
Kab. Bengkulu Selatan	17.391.000.000	22.042.030.167	0,78899	78,90
Kab. Bengkulu Utara	19.924.000.000	13.350.500.135	1,49238	149,24
2008				
Kota Bengkulu	24.562.456.079	29.979.202.000,00	0,81932	81,93
Kab. Rejang lebong	17.728.348.575	20.477.133.380,64	0,86576	86,58
Kab. Bengkulu Selatan	16.089.927.571	12.906.322.429	1,24667	124,67
Kab. Bengkulu Utara	18.000.002.000	15.993.360.501,04	1,12547	112,55
2007				
Kota Bengkulu	17.885.739.044,15	22.343.370.000,00	0,80049	80,05
Kab. Rejang lebong	17.839.691.984,14	15.169.837.568	1,176	117,60
Kab. Bengkulu Selatan	14.914.070.962,72	15.145.732.000	0,9847	98,47
Kab. Bengkulu Utara	12.635.764.022,44	12.557.612.000	1,00622	100,62
2006				
Kota Bengkulu	16.702.355.180,00	20.026.769.000,00	0,834	83,40
Kab. Rejang lebong	13.710.130.000,00	11.181.110.000,00	1,22619	122,62
Kab. Bengkulu Selatan	8.958.390.000,00	8.189.050.000,00	1,09395	109,39
Kab. Bengkulu Utara	8.632.550.000,00	8.632.550.000,00	1	100,00
2005				
Kota Bengkulu	13.920.344.968,08	16.703.426.000,00	0,83338	83,34
Kab. Rejang lebong	8.858.510.000,00	10.665.200.000,00	0,8306	83,06
Kab. Bengkulu Selatan	5.462.820.000,00	6.124.860.000,00	0,89191	89,19
Kab. Bengkulu Utara	2.073.710.000,00	2.222.150.000,00	0,9332	93,32
2004				
Kota Bengkulu	15.394.973.809,39	17.502.275.700,00	0,8796	87,96
Kab. Rejang lebong	8.858.510.000,00	16.252.280.000,00	0,54506	54,51
Kab. Bengkulu Selatan	5.462.820.000,00	7.780.390.000,00	0,70213	70,21
Kab. Bengkulu Utara	834.104.724,20	4.578.110.000,00	0,18219	18,22
2003				
Kota Bengkulu	9.685.850.000,00	7.837.730.000,00	1,2358	123,58
Kab. Rejang lebong	7.535.240.000,00	8.317.020.000,00	0,906	90,60
Kab. Bengkulu Selatan	4.595.160.000,00	7.244.950.000,00	0,63426	63,43

Kab. Bengkulu Utara	8.820.170.000,00	5.250.820.000,00	1,67977	167,98
2002				
Kota Bengkulu	6.801.490.000,00	5.186.070.000,00	1,31149	131,15
Kab. Rejang lebung	6.118.240.000,00	6.036.850.000,00	1,01348	101,35
Kab. Bengkulu Selatan	6.119.430.000,00	8.826.600.000,00	0,69329	69,33
Kab. Bengkulu Utara	6.700.310.000,00	5.130.000.000,00	1,3061	130,61
2001				
Kota Bengkulu	5.169.968.209,64	5.377.246.000,00	0,96145	96,15
Kab. Rejang lebung	4.526.050.000,00	4.600.791.000	0,98375	98,38
Kab. Bengkulu Selatan	4.192.120.000,00	4.490.500.000	0,93355	93,36
Kab. Bengkulu Utara	15.759.690.000,00	16.568.240.322	0,9512	95,12
1999/2000				
Kota Bengkulu	4.127.696.013,29	4.206.519.000,00	0,98126	98,13
Kab. Rejang lebung	2.982.838.774,00	3.472.731.380,00	0,85893	85,89
Kab. Bengkulu Selatan	1.303.992.832,00	1.508.457.290	0,86445	86,45
Kab. Bengkulu Utara	2.146.067.620,00	2.331.463.751,69	0,92048	92,05
1998/1999				
Kota Bengkulu	2.426.790.590,00	3.910.439.300,00	0,62059	62,06
Kab. Rejang lebung	1.438.450.871,00	1.608.937.040	0,89404	89,40
Kab. Bengkulu Selatan	2.253.325.220,00	2.438.601.931	0,92402	92,40
Kab. Bengkulu Utara	1.632.413.471,00	2.066.288.400	0,79002	79,00
1997/1998				
Kota Bengkulu	4.138.370.690,70	4.369.595.352,14	0,94708	94,71
Kab. Rejang lebung	2.283.273.761,74	2.439.653.280	0,9359	93,59
Kab. Bengkulu Selatan	1.480.770.559,57	1.673.889.307	0,88463	88,46
Kab. Bengkulu Utara	1.358.894.482,46	1.468.923.100	0,9251	92,51
1996/1997				
Kota Bengkulu	3.822.310.973,23	3.347.276.000,00	1,14192	114,19
Kab. Rejang lebung	1.940.906.054,00	1.987.355.400	0,97663	97,66
Kab. Bengkulu Selatan	1.401.349.882,00	1.500.440.243	0,93396	93,40
Kab. Bengkulu Utara	835.087.733,00	980.349.324	0,85183	85,18
1995/1996				
Kota Bengkulu	3.279.001.156,44	3.432.567.007,32	0,95526	95,53
Kab. Rejang lebung	2.562.308.975,66	2.650.423.684,63	0,96675	96,68
Kab. Bengkulu Selatan	921.216.951,30	1.001.235.689,00	0,92008	92,01
Kab. Bengkulu Utara	677.217.114,04	735.219.421,00	0,92111	92,11
1994/1995				
Kota Bengkulu	2.603.242.243	3.426.765.000	0,75968	75,97
Kab. Rejang lebung	2.514.003.807	2.615.004.507	0,96138	96,14
Kab. Bengkulu Selatan	497.855.167	521.480.135	0,9547	95,47
Kab. Bengkulu Utara	653.270.244	473.684.153	1,37913	137,91

Sumber: Data di olah sendiri (2014)

Lampiran 1.8

Rasio Share PAD

Nama Daerah	PAD	Total Belanja	Hasil	Rasio (%)
2012				
Kota Bengkulu	54.820.968.854	28.665.216.424,30	1,91246	191,25
Kab. Rejang lebong	25.886.241.431	85.351.061.282	0,30329	30,33
Kab. Bengkulu Selatan	13.866.048.560	21.416.962.540,50	0,64743	64,74
Kab. Bengkulu Utara	25.888.700.000	23.768.162.285,30	1,08922	108,92
2011				
Kota Bengkulu	46.574.964.682	595.218.619.343	0,07825	7,82
Kab. Rejang lebong	30.923.582.372	54.953.330.332	0,56272	56,27
Kab. Bengkulu Selatan	14.342.487.760	476.746.036.992,95	0,03008	3,01
Kab. Bengkulu Utara	24.662.500.000	590.678.381.934,40	0,04175	4,18
2010				
Kota Bengkulu	41.499.566.156	543.436.254.281	0,07637	7,64
Kab. Rejang lebong	31.118.232.279	495.360.839.692,86	0,06282	6,28
Kab. Bengkulu Selatan	15.189.124.113	396.438.100.417,36	0,03831	3,83
Kab. Bengkulu Utara	20.900.000.000	490.008.118.121,01	0,04265	4,27
2009				
Kota Bengkulu	34.068.000.000	500.985.048.800,00	0,068	6,80
Kab. Rejang lebong	17.992.000.000	491.779.699.481,83	0,03659	3,66
Kab. Bengkulu Selatan	17.391.000.000	374.572.123.786,00	0,04643	4,64
Kab. Bengkulu Utara	19.924.000.000	446.095.313.474,00	0,04466	4,47
2008				
Kota Bengkulu	24.562.456.079	439.848.854.619,00	0,05584	5,58
Kab. Rejang lebong	17.728.348.575	523.398.904.204,94	0,03387	3,39
Kab. Bengkulu Selatan	16.089.927.571	384.783.695.770,00	0,04182	4,18
Kab. Bengkulu Utara	18.000.002.000	552.024.625.367,00	0,03261	3,26
2007				
Kota Bengkulu	17.885.739.044,15	299.730.755.599,00	0,05967	5,97
Kab. Rejang lebong	17.839.691.984,14	275.114.661.263,99	0,06484	6,48
Kab. Bengkulu Selatan	14.914.070.962,72	212.249.202.554,58	0,07027	7,03
Kab. Bengkulu Utara	12.635.764.022,44	304.200.734.846,94	0,04154	4,15
2006				
Kota Bengkulu	16.702.355.180,00	318.014.650.000,00	0,05252	5,25
Kab. Rejang lebong	13.710.130.000,00	284.365.180.000,00	0,04821	4,82
Kab. Bengkulu Selatan	8.958.390.000,00	257.766.890.000,00	0,03475	3,48
Kab. Bengkulu Utara	8.632.550.000,00	357.130.540.000,00	0,02417	2,42
2005				
Kota Bengkulu	13.920.344.968,08	215.046.790,00	64,7317	6.473,17
Kab. Rejang lebong	8.858.510.000,00	169.436.730.000	0,05228	5,23
Kab. Bengkulu Selatan	5.462.820.000,00	133.294.140.000	0,04098	4,10
Kab. Bengkulu Utara	2.073.710.000,00	106.464.930.000	0,01948	1,95
2004				
Kota Bengkulu	15.394.973.809,39	213.124.810.000	0,07223	7,22
Kab. Rejang lebong	8.858.510.000,00	205.362.410.000	0,04314	4,31
Kab. Bengkulu Selatan	5.462.820.000,00	124.074.670.000	0,04403	4,40
Kab. Bengkulu Utara	834.104.724,20	225.928.349.793	0,00369	0,37

2003				
Kota Bengkulu	9.685.850.000,00	200.961.690.000	0,0482	4,82
Kab. Rejang lebong	7.535.240.000,00	176.239.090.000	0,04276	4,28
Kab. Bengkulu Selatan	4.595.160.000,00	262.743.860.000	0,01749	1,75
Kab. Bengkulu Utara	8.820.170.000,00	186.839.820.000	0,04721	4,72
2002				
Kota Bengkulu	6.801.490.000,00	101.410.900.000	0,06707	6,71
Kab. Rejang lebong	6.118.240.000,00	144.033.160.000	0,04248	4,25
Kab. Bengkulu Selatan	6.119.430.000,00	168.059.400.000	0,03641	3,64
Kab. Bengkulu Utara	6.700.310.000,00	143.868.070.000	0,04657	4,66
2001				
Kota Bengkulu	5.169.968.209,64	85.164.790.000	0,06071	6,07
Kab. Rejang lebong	4.526.050.000,00	125.269.780.000	0,03613	3,61
Kab. Bengkulu Selatan	4.192.120.000,00	130.835.000.000	0,03204	3,20
Kab. Bengkulu Utara	15.759.690.000,00	123.766.380.000	0,12733	12,73
1999/2000				
Kota Bengkulu	4.127.696.013,29	29.500.117.000	0,13992	13,99
Kab. Rejang lebong	2.982.838.774,00	50.126.334.680	0,05951	5,95
Kab. Bengkulu Selatan	1.303.992.832,00	56.431.904.075	0,02311	2,31
Kab. Bengkulu Utara	2.146.067.620,00	50.188.635.898	0,04276	4,28
1998/1999				
Kota Bengkulu	2.426.790.590,00	35.911.126.170	0,06758	6,76
Kab. Rejang lebong	1.438.450.871,00	34.563.347.299	0,04162	4,16
Kab. Bengkulu Selatan	2.253.325.220,00	15.867.863.499	0,14201	14,20
Kab. Bengkulu Utara	1.632.413.471,00	40.499.598.561	0,04031	4,03
1997/1998				
Kota Bengkulu	4.138.370.690,70	17.707.895.148,42	0,2337	23,37
Kab. Rejang lebong	2.283.273.761,74	30.771.330.138	0,0742	7,42
Kab. Bengkulu Selatan	1.480.770.559,57	33.230.127.266	0,04456	4,46
Kab. Bengkulu Utara	1.358.894.482,46	28.471.271.549,20	0,04773	4,77
1996/1997				
Kota Bengkulu	3.822.310.973,23	14.463.663.056	0,26427	26,43
Kab. Rejang lebong	1.940.906.054,00	25.478.668.544	0,07618	7,62
Kab. Bengkulu Selatan	1.401.349.882,00	27.654.848.422	0,05067	5,07
Kab. Bengkulu Utara	835.087.733,00	22.881.908.133	0,0365	3,65
1995/1996				
Kota Bengkulu	3.279.001.156,44	11.883.964.040,00	0,27592	27,59
Kab. Rejang lebong	2.562.308.975,66	22.034.681.914,00	0,11629	11,63
Kab. Bengkulu Selatan	921.216.951,30	23.508.602.647,50	0,03919	3,92
Kab. Bengkulu Utara	677.217.114,04	19.933.745.364,00	0,03397	3,40
1994/1995				
Kota Bengkulu	2.603.242.243	10.149.975.051,00	0,25648	25,65
Kab. Rejang lebong	2.514.003.807	17.874.613.756,00	0,14065	14,06
Kab. Bengkulu Selatan	497.855.167	18.477.771.439,00	0,02694	2,69
Kab. Bengkulu Utara	653.270.244	16.109.263.936,00	0,04055	4,06

Sumber: Data di olah sendiri (2014)

Lampiran 1.9

Growht PAD Kota Bengkulu

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Xn)	Realisasi Penerimaan PAD Xn-(Xn-1)	Realisasi Penerimaan PAD Xn-1	Hasil	Rasio (%)
94/95	2.603.242.243	-	-	-	-
95/96	3.279.001.156,44	675.758.913,44	2.603.242.243	0,259584	25,96
96/97	3.822.310.973,23	543.309.816,79	3.279.001.156,44	0,165694	16,57
97/98	4.138.370.690,70	316.059.717,47	3.822.310.973,23	0,082688	8,27
98/99	2.426.790.590,00	-1.711.580.100,70	4.138.370.690,70	-0,41359	-41,36
99/00	4.127.696.013,29	1.700.905.423,29	2.426.790.590,00	0,700887	70,09
2001	5.169.968.209,64	1.042.272.196,35	4.127.696.013,29	0,252507	25,25
2002	6.801.490.000,00	1.631.521.790,36	5.169.968.209,64	0,315577	31,56
2003	9.685.850.000,00	2.884.360.000,00	6.801.490.000,00	0,424078	42,41
2004	15.394.973.809,39	5.709.123.809,39	9.685.850.000,00	0,589429	58,94
2005	13.920.344.968,08	-1.474.628.841,31	15.394.973.809,39	-0,09579	-9,58
2006	16.702.355.180,00	2.782.010.211,92	13.920.344.968,08	0,199852	19,99
2007	17.885.739.044,15	1.183.383.864,15	16.702.355.180,00	0,070851	7,09
2008	24.562.456.079	6.676.717.034,84	17.885.739.044,15	0,373298	37,33
2009	34.068.000.000	9.505.543.921,01	24.562.456.079	0,386995	38,70
2010	41.499.566.156	7.431.566.156,00	34.068.000.000	0,218139	21,81
2011	46.574.964.682	5.075.398.526,00	41.499.566.156	0,1223	12,23
2012	54.820.968.854	8.246.004.172,00	46.574.964.682	0,177048	17,70

Sumber: data dioah sendiri (2014)

Lampiran 1.10

Growht PAD Kab. Rejang Lebong

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Xn)	Realisasi Penerimaan PAD Xn-(Xn-1)	Realisasi Penerimaan PAD Xn-1	Hasil	Rasio (%)
94/95	2.514.003.807	-	-	-	-
95/96	2.562.308.975,66	48.305.168,66	2.514.003.807	0,01921	1,92
96/97	1.940.906.054,00	-621.402.921,66	2.562.308.975,66	-0,24252	-24,25
97/98	2.283.273.761,74	342.367.707,74	1.940.906.054,00	0,1764	17,64
98/99	1.438.450.871,00	-844.822.890,74	2.283.273.761,74	-0,37001	-37,00
99/00	2.982.838.774,00	1.544.387.903,00	1.438.450.871,00	1,07365	107,36
2001	4.526.050.000,00	1.543.211.226,00	2.982.838.774,00	0,51736	51,74
2002	6.118.240.000,00	1.592.190.000,00	4.526.050.000,00	0,35178	35,18
2003	7.535.240.000,00	1.417.000.000,00	6.118.240.000,00	0,2316	23,16
2004	8.858.510.000,00	1.323.270.000,00	7.535.240.000,00	0,17561	17,56
2005	8.858.510.000,00	0,00	8.858.510.000,00	0	0,00
2006	13.710.130.000,00	4.851.620.000,00	8.858.510.000,00	0,54768	54,77
2007	17.839.691.984,14	4.129.561.984,14	13.710.130.000,00	0,30121	30,12
2008	17.728.348.575	-111.343.409,14	17.839.691.984,14	-0,00624	-0,62
2009	17.992.000.000	263.651.425,00	17.728.348.575	0,01487	1,49
2010	31.118.232.279	13.126.232.279,00	17.992.000.000	0,72956	72,96
2011	30.923.582.372	-194.649.907,00	31.118.232.279	-0,00626	-0,63
2012	25.886.241.431	-5.037.340.941,00	30.923.582.372	-0,1629	-16,29

Sumber: data dioah sendiri (2014)

Lampiran 1.11

Growht PAD Kab. Bengkulu Selatan

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Xn)	Realisasi Penerimaan PAD Xn-(Xn-1)	Realisasi Penerimaan PAD Xn-1	Hasil	Rasio (%)
94/95	497.855.167	-	-	-	-
95/96	921.216.951,30	423.361.784,30	497.855.167	0,85037	85,04
96/97	1.401.349.882,00	480.132.930,70	921.216.951,30	0,52119	52,12
97/98	1.480.770.559,57	79.420.677,57	1.401.349.882,00	0,05667	5,67
98/99	2.253.325.220,00	772.554.660,43	1.480.770.559,57	0,52172	52,17
99/00	1.303.992.832,00	-949.332.388,00	2.253.325.220,00	-0,4213	-42,13
2001	4.192.120.000,00	2.888.127.168,00	1.303.992.832,00	2,21483	221,48
2002	6.119.430.000,00	1.927.310.000,00	4.192.120.000,00	0,45975	45,97
2003	4.595.160.000,00	-1.524.270.000,00	6.119.430.000,00	-0,24909	-24,91
2004	5.462.820.000,00	867.660.000,00	4.595.160.000,00	0,18882	18,88
2005	5.462.820.000,00	0,00	5.462.820.000,00	0	0,00
2006	8.958.390.000,00	3.495.570.000,00	5.462.820.000,00	0,63988	63,99
2007	14.914.070.962,72	5.955.680.962,72	8.958.390.000,00	0,66482	66,48
2008	16.089.927.571	1.175.856.608,28	14.914.070.962,72	0,07884	7,88
2009	17.391.000.000	1.301.072.429,00	16.089.927.571	0,08086	8,09
2010	15.189.124.113	-2.201.875.887,00	17.391.000.000	-0,12661	-12,66
2011	14.342.487.760	-846.636.353,00	15.189.124.113	-0,05574	-5,57
2012	13.866.048.560	-476.439.200,00	14.342.487.760	-0,03322	-3,32

Sumber: data dioah sendiri (2014)

Lampiran 1.12

Growht PAD Kab. Bengkulu Utara

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Xn)	Realisasi Penerimaan PAD Xn-(Xn-1)	Realisasi Penerimaan PAD Xn-1	Hasil	Rasio (%)
94/95	653.270.244	-	-	-	-
95/96	677.217.114,04	23.946.870,04	653.270.244	0,03666	3,67
96/97	835.087.733,00	157.870.618,96	677.217.114,04	0,23312	23,31
97/98	1.358.894.482,46	523.806.749,46	835.087.733,00	0,62725	62,72
98/99	1.632.413.471,00	273.518.988,54	1.358.894.482,46	0,20128	20,13
99/00	2.146.067.620,00	513.654.149,00	1.632.413.471,00	0,31466	31,47
2001	15.759.690.000,00	13.613.622.380,00	2.146.067.620,00	6,34352	634,35
2002	6.700.310.000,00	-9.059.380.000,00	15.759.690.000,00	-0,57485	-57,48
2003	8.820.170.000,00	2.119.860.000,00	6.700.310.000,00	0,31638	31,64
2004	834.104.724,20	-7.986.065.275,80	8.820.170.000,00	-0,90543	-90,54
2005	2.073.710.000,00	1.239.605.275,80	834.104.724,20	1,48615	148,62
2006	8.632.550.000,00	6.558.840.000,00	2.073.710.000,00	3,16285	316,29
2007	12.635.764.022,44	4.003.214.022,44	8.632.550.000,00	0,46373	46,37
2008	18.000.002.000	5.364.237.977,56	12.635.764.022,44	0,42453	42,45
2009	19.924.000.000	1.923.998.000,00	18.000.002.000	0,10689	10,69
2010	20.900.000.000	976.000.000,00	19.924.000.000	0,04899	4,90
2011	24.662.500.000	3.762.500.000,00	20.900.000.000	0,18002	18,00
2012	25.888.700.000	1.226.200.000,00	24.662.500.000	0,04972	4,97

Sumber: data dioah sendiri (2014)

Lampiran 2

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RDF1	24	.03	.35	.0739	.07501
RDF2	24	.00	.09	.0378	.01839
RDF3	24	.02	.14	.0536	.04219
RkKD1	24	.39	9.10	1.4503	1.85594
RkKD2	24	.76	2.95	1.0941	.58699
RkKD3	24	.68	.97	.8840	.08905
RKD1	24	.03	.16	.0606	.03163
RKD2	24	.00	.10	.0401	.02298
RKD3	24	.02	.20	.0670	.05984
REKD1	24	.02	1.56	.9364	.46138
REKD2	24	.18	1.68	.9401	.29539
REKD3	24	.62	1.38	.9279	.13493
RS1	24	.03	1.91	.2284	.44101
RS2	24	.00	64.73	2.7405	13.20410
RS3	24	.02	.28	.0964	.08197
RG1	24	-.16	.73	.1709	.23367
RG2	24	-.91	6.34	.6914	1.46512
RG3	24	-.42	1.07	.1913	.38195
Valid N (listwise)	24				

Lampiran 3

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		RDF1	RDF2	RkKD1	RkKD2	RKD1	RKD2	REKD1	REKD2	RS1	RS2	RG1	RG2
N		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Normal Parameters ^a	Mean	.0739	.0378	1.4503	1.0941	.0606	.0401	.9364	.9401	.2284	2.7405	.1709	.6914
	Std. Deviation	.07501	.01839	1.85594	.58699	.03163	.02298	.46138	.29539	.44101	13.20410	.23367	1.46512
Most Extreme Differences	Absolute	.314	.169	.464	.396	.230	.155	.208	.152	.425	.537	.166	.347
	Positive	.314	.169	.464	.396	.230	.155	.135	.152	.425	.537	.166	.347
	Negative	-.276	-.093	-.283	-.282	-.161	-.084	-.208	-.147	-.326	-.418	-.083	-.177
Kolmogorov-Smirnov Z		1.541	.828	2.275	1.940	1.128	.757	1.019	.744	2.082	2.630	.812	1.702
Asymp. Sig. (2-tailed)		.017	.499	.000	.001	.157	.615	.250	.637	.000	.000	.525	.006

a. Test distribution is Normal.

Lampiran 4

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		RDF1	RDF3	RkKD1	RkKD3	RKD1	RKD3	REKD1	REKD3	RS1	RS3	RG1	RG3
N		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Normal Parameters ^a	Mean	.0739	.0536	1.4503	.8840	.0606	.0670	.9364	.9279	.2284	.0964	.1709	.1913
	Std. Deviation	.07501	.04219	1.85594	.08905	.03163	.05984	.46138	.13493	.44101	.08197	.23367	.38195
Most Extreme Differences	Absolute	.314	.247	.464	.279	.230	.237	.208	.263	.425	.264	.166	.142
	Positive	.314	.247	.464	.157	.230	.237	.135	.263	.425	.264	.166	.137
	Negative	-.276	-.188	-.283	-.279	-.161	-.203	-.208	-.162	-.326	-.185	-.083	-.142
Kolmogorov-Smirnov Z		1.541	1.212	2.275	1.365	1.128	1.161	1.019	1.288	2.082	1.295	.812	.694
Asymp. Sig. (2-tailed)		.017	.106	.000	.048	.157	.135	.250	.073	.000	.070	.525	.722

a. Test distribution is Normal.

Lampiran 5

Test Statistics^a

	RDF2 - RDF1	RkKD2 - RkKD1	RS2 - RS1	RG2 - RG1
Z	-3.343 ^b	-.543 ^b	-1.714 ^b	-1.943 ^c
Asymp. Sig. (2-tailed)	.001	.587	.086	.052

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

c. Based on negative ranks.

Lampiran 6

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	RKD1 - RKD2	.02050	.03336	.00681	.00641	.03459	3.010	23	.006
Pair 2	REKD1 - REKD2	-.00372	.56169	.11465	-.24090	.23345	-.032	23	.974

Lampiran 7

Test Statistics^a

	RDF3 - RDF1	RkKD3 - RkKD1	RS3 - RS1
Z	-1.086 ^b	-1.714 ^b	-.086 ^c
Asymp. Sig. (2-tailed)	.278	.086	.932

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

c. Based on negative ranks.

Lampiran 8

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the				
					Difference				
Lower	Upper								
Pair 1	RKD1 - RKD3	-.00641	.05977	.01220	-.03164	.01883	-.525	23	.604
Pair 2	REKD1 - REKD3	.00850	.48067	.09812	-.19447	.21147	.087	23	.932
Pair 3	RG1 - RG3	-.02035	.47472	.09690	-.22081	.18011	-.210	23	.836